

## BAB II

### SEJARAH EKSPLOITASI FOSFAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP LINGKUNGAN DI NAURU

Bab ini membahas akan dampak eksploitasi fosfat yang mengubah Nauru dari negara yang kaya akan sumber daya menjadi wilayah tandus dan tidak dapat dihuni lagi. Penambangan yang dilakukan oleh kolonial ini menyebabkan kerusakan lingkungan, ketergantungan ekonomi, dan juga perubahan sosial. Bab ini membahas tentang awal sejarah ditemukannya fosfat, masa eksploitasi yang dilakukan oleh Jerman, Australia, Selandia Baru, dan Jepang. Eksploitasi pun dikuasi oleh pemerintahan Nauru sendiri dan pada akhirnya menyebabkan kerusakan yang fatal bagi masyarakat Nauru.

#### **2.1 Negara Kepulauan Nauru**

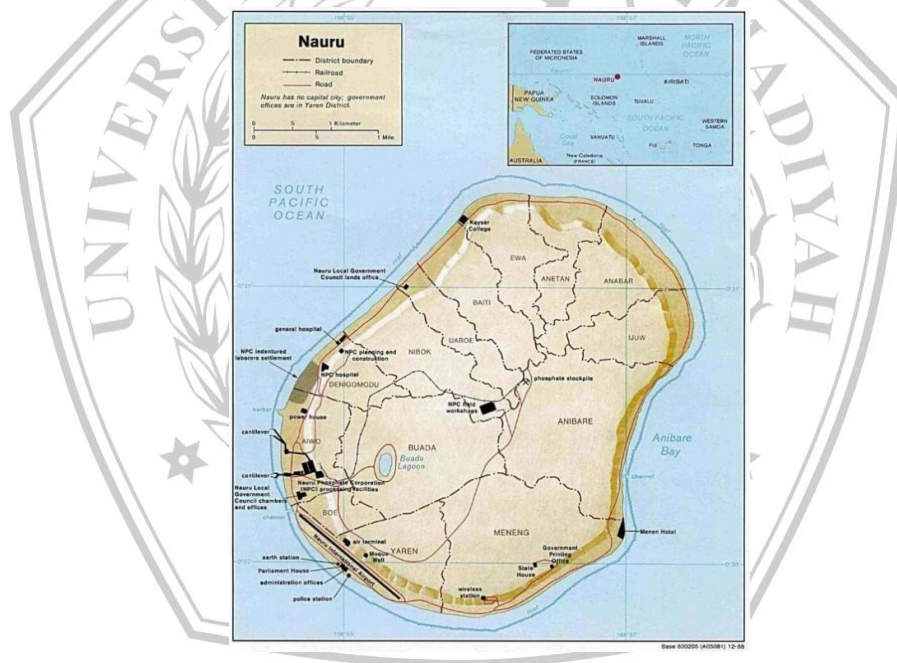
Republik Nauru adalah pulau karang tunggal yang terlihat pada garis khatulistiwa di Pasifik Barat yang pada sejarahnya terisolasi dari berbagai pulau lain termasuk pulau terdekatnya yaitu Banaba (Ocean Island) yang terletak sekitar 300 kilometer pada sebelah timur. Negara kepulauan Nauru ini memiliki luas 21 kilometer persegi, dengan jalur pantai yang sempit dan relatif subur serta dataran tinggi pada bagian tengah yang menjulang sekitar 65 meter<sup>33</sup>. Pada dataran tinggi

---

<sup>33</sup> John Connell, *Nauru: The First Failed Pacific State?*, *The Round Table: The Commonwealth Journal of International Affairs*, vol 95, no 383, hal 48.

tersebut mengandung endapan banyak endapan fosfat yang kini telah habis. Negara Nauru mempunyai sumber daya air tawar yang terbatas dan sebagian besar bergantung pada pabrik desalinasi tua, tangki air hujan, serta pengiriman air tawar sesekali dari Kosrae. Nauru terletak di sebelah selatan khatulistiwa dan berada ditengah-tengah antara Hawaii dan Australia, tidak ada pulau-pulau di dekat pulau Nauru. Hal ini juga ditambah dengan kuatnya arus ekuator ke arah barat yang mana arus deras ini menghalangi masyarakat Nauru untuk melakukan perjalanan dan juga penjelajahan serta membatasi mereka di pulau mereka sendiri<sup>34</sup>.

**Gambar 2. 1 Peta Nauru**



Sumber: <https://images.app.goo.gl/wW6bwnCB83B9mk6TA>

Negara kepulauan Nauru menganut sistem pemerintahan parlementer, di mana presiden Nauru bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala

<sup>34</sup> Marry Nazzal, *Nauru: An Environment Destroyed and International Law*, Fiji National University, diakses dalam <http://www.lawanddevelopment.org/docs/nauru.pdf> (27/5/2025, 07:16 WIB).

pemerintahan yang dipilih oleh parlemennya yang berjumlah 19 orang melalui sistem yang proposional. Parlemen ini memegang kekuasaan legislatif sedangkan presiden dan juga kabinet memegang eksekutif<sup>35</sup>. Sistem dari peradilan di negara ini terdiri atas tingkat pertama dan juga banding. Nauru tidak mempunyai ibu kota yang resmi, namun distrik Yaren dijadikan sebagai pusat dari pemerintahan serta pemukiman terbesar, tempat dari kantor parlemen dan juga beberapa kedutaan besar. Jumlah penduduk dari negara ini terhitung kecil.

Dengan kepadatan penduduknya yang mencapai 600 jiwa per km<sup>2</sup>, mayoritas penduduknya bertempat tinggal pada wilayah pesisir dan perkotaan. Secara suku penduduk Nauru sebesar 58% adalah penduduk asli, 26% berasal dari pasifik lainnya, di Nauru juga ada komunitas Tionghoa dan juga Eropa. Pada tahun 1932 populasi penduduk Nauru menurun mencapai 1500 jiwa. Perang dunia kedua memberikan penurunan yang lebih lanjut serta populasi yang mencapai 1500 jiwa lagi di tahun 1949, di mana ini adalah tahun yang sama saat sekolah menengah kebawah pertama di buka pada negara kepulauan ini. populasi negara Nauru pun bertumbuh hingga 4700 jiwa pada awal tahun 1980-an, meskipun hal ini terjadi karena datangnya para pekerja imigran. Terhitung pada tahun 2025 ini, jumlah penduduk Nauru sebanyak 12,019 jiwa<sup>36</sup>. Hal ini menjadikan Nauru sebagai negara dengan populasi terkecil.

---

<sup>35</sup> St. Husnul Khatimah, *Republik Nauru: Deskripsi dan Analisis*, diakses dalam [https://www.academia.edu/16567341/Republik\\_Nauru\\_Deskripsi\\_dan\\_analisis](https://www.academia.edu/16567341/Republik_Nauru_Deskripsi_dan_analisis) (28/5/2025, 07:23).

<sup>36</sup> Worldometer, *Nauru population (2025)*, diakses dalam <https://www.worldometers.info/world-population/nauru-population/> (12/5/2025, 19.44 WIB).

Bahasa resmi yang digunakan masyarakat Nauru adalah gabungan antara Nauruan dan Inggris. Pada awalnya Nauru pernah menjadi salah satu negara paling kaya di dunia, hal ini dapat terjadi karena adanya cadangan fosfat yang melimpah di negaranya. Namun karena adanya eksploitasi berlebihan dari para kolonian, menyebabkan negara ini menjadi negara termiskin. Negara kepulauan Nauru ini termasuk dalam kategori negara berkembang bahkan tidak jarang disebut negara miskin. Perekonomian tradisional masyarakat Nauru adalah sistem subsisten pulau karang yang khas dengan mengandalkan makanan pokok kelapa, pandan, dan sukun, terlebih pada daerah pesisir. Nauru bukan pulau yang makmur secara ekologis seperti banyak pulau pasifik lainnya. Dengan bentuk yang menyerupai topi yaitu dataran tinggi di tengah dan sabuk pantai yang sempit pada pinggirnya membuat pulau ini mengalami keterbatasan sumber daya alam dan juga air bersih<sup>37</sup>.

## **2.2 Kondisi Pra-Eksploitasi Fosfat di Nauru**

Sebelum ditemukannya cadangan fosfat di Nauru, negara ini merupakan sebuah pulau kecil dengan kondisi ekologis yang seimbang dan alami. Lingkungan di Nauru didominasi oleh vegetasi tropis, tanah subur di sekitar pesisir, dan juga sumber daya laut yang melimpah<sup>38</sup>. Masyarakat lokalnya hidup dalam sistem sosial yang sederhana namun kuat dan erat dengan budaya yang diberikan oleh nenek moyang mereka yaitu komunal dan juga hubungan erat dengan alam. Keseimbangan ekologis serta ketertarikan masyarakatnya pada tanah serta laut

---

<sup>37</sup> Tanja Dreher, Michelle Voyer, *Climate Refugees or Migrants? Contesting Media Frames on Climate Justice in Pacific*, Environmental Communication, vol.9, no. 1 (2015), hal. 58-76.

<sup>38</sup> Arthur Felix Ellis, 1935, *Ocean Island and Nauru*, Sydney: Angus and Robertson.

menciptakan pola hidup yang selaras dengan lingkungan tanpa adanya intervensi dari eksternal.

Pada aspek sosial dan ekonomi, masyarakat Nauru menjalankan kehidupan yang mandiri dan berkelanjutan. Mata pencaharian utama adalah pertanian subsisten, perikanan tradisional, dan juga sistem tukar menukar barang yang memperkuat solidaritas komunitas<sup>39</sup>. Pangan dikonsumsi langsung dari hasil laut dan juga kebun, seperti ikan, kelapa dan umbi-umbian yang penuh serat dan bergizi yang sehat dan alami. Ketergantungan terhadap dunia luar sangat kecil, membuat masyarakat memiliki kedaulatan penuh atas sumber daya dan juga kehidupan masyarakat lokal. Sebelum eksploitasi ini dilakukan, tidak hanya lingkungan Nauru yang lestari, tetapi juga tatanan sosial dan pola hidup masyarakatnya masih stabil dan berakar kuat pada nilai-nilai lokal.

### **2.2.1 Kondisi Sosial dan Budaya Masyarakat Nauru Sebelum Eksploitasi**

#### **Fosfat**

Keterpencilan Nauru ini membuat masyarakatnya membangun sebuah sistem sosial yang berbasis klan – klan, yang di mana terdapat 12 klan matrilineal yang berkuasa dan berperan penting pada struktur sosial dan juga politik lokal<sup>40</sup>. Setiap individu di Nauru mempunyai ikatan yang kuat dengan tanah leluhur yang telah diwariskan secara turun-temurun sedari garis ibu dan juga adanya berbagai hak tradisional atas hasil laut serta darat. Masyarakat Nauru berusaha mengatasi segala faktor yang berada diluar kendali mereka dengan cara

---

<sup>39</sup> Alois Kayser, 2005, *Nauru: One Hundred Years Ago*, Suva: Institute of Pacific Studies, University of the South Pacific Centre on Nauru.

<sup>40</sup> Nancy Viviani, *A History of Nauru*, Thesis, Australian National University hal.4

mengembangkan teknik yang dapat memanfaatkan sumber daya mereka yang paling penting yaitu laut dan juga daratan<sup>41</sup>. Selayaknya mayoritas dari penduduk pasifik lainnya, masyarakat Nauru bekerja sebagai nelayan dan menjadikan ini sebagai pekerjaan utama lelaki Nauru.

Kano adalah kerajinan yang sangat berkembang di Nauru dan juga terhitung terbatas pada kalangan elit profesional. Kano sendiri adalah cadik dari jenis Polinesia yang terbuat dari papan kayu pohon tomat yang dijahit dengan jarum tulang dan jaring dari kelapa yang digunakan untuk memancing dengan tombak dan jaring baik di dalam ataupun diluar terumbu karang. Sementara itu kegiatan memancing ikan terbang pada malam hari dengan menggunakan obor yang menjadi kegiatan sosial sekaligus acara untuk mengumpulkan makanan. Laut yang berombak tinggi dan juga pasok ikan yang tidak terlalu melimpah di dekat pulau menyebabkan munculnya sistem budidaya ikan di Nauru. Masyarakat Nauru mengumpulkan benih ikan ibija dari terumbu karang dengan saringan yang terbuat dari daun kelapa yang pipih dan kecil<sup>42</sup>. Nantinya benih ikan tersebut akan dipindahkan pada setengah tempurung kelapa yang berisi air laut yang digantung menggunakan tali di mulut nelayan. Kerang tersebut nantinya akan digantung di luar rumah sang nelayan selama dua atau tiga minggu.

Pada saat air asin menguap, airnya akan diganti dengan air tawar yang pada akhirnya ikan yang ada pada karang tersebut akan perlahan beradaptasi dan akan dilepaskan ke Laguna Bauda ataupun kolam lainnya untuk berkembang biak.

---

<sup>41</sup> *Ibid. hal. 49*

<sup>42</sup> *Ibid. hal 50*

Laguna Buada yang telah terbagi menjadi beberapa bagian karena adanya pohon kelapa pendek dan juga saluran pada sekitar pulau adalah milik perorangan di Nauru. Kano serta alat memancing yang lainnya juga adalah milik pribadi para nelayan. Namun, ada beberapa konsumsi komunal yang dipraktikkan karena jika ikan yang ditangkap dari Kano adalah hak semua orang dari hasil tangkapan.

Nauru sangat menjunjung tinggi sistem kepemilikan tanah, terbukti mereka semua sangat menghormati sistem ini. Semua bentuk produksi dan juga konsumsi masyarakat Nauru mempunyai dasar sosial yang kuat, termasuk pada larangan budaya terhadap perempuan pada aktivitas memancing, yang secara tidak langsung menunjukkan struktur patriarkal yang terorganisasi<sup>43</sup>. Kesederhanaan masyarakat Nauru tidak menutup sistem hukum, aturan adat, dan juga kepemimpinan lokal yang juga disebut dengan *garamen* atau arti lainnya adalah kepala klan. Hubungan antara klan dapat ditentukan oleh pernikahan, aliansi politik, serta pada beberapa kasus yang menyertakan konflik berdarah. Lahan-lahan di pulau Nauru yang diolah maupun tidak diolah memiliki pemilik secara perorangan. Kepemilikan ini mencakup hak untuk membuang dan hak untuk memberikan hasil tanah mereka kepada pengurung tanahnya. Kelapa dan juga pandan selalu dijaga dengan ketat namun dapat diambil jika sudah diberi izin oleh pemilliknya.

Pohon kelapa ini telah memenuhi banyak kebutuhan masyarakat Nauru<sup>44</sup>. Masyarakat Nauru menjadikan kayu serta daunnya untuk rumah, tempurung

---

<sup>43</sup> Davidson, J. W. (1968). *The republic of Nauru*. The Journal of Pacific History, 3(1), 145–150. <https://doi.org/10.1080/00223346808572131>

<sup>44</sup> Randolph R. Thaman, *Vegetation of Nauru and the Gillbert Island: Case Studies of Poverty, Degradation, Disturbance, and Displacement*, Pacific Science, vol,46, no 2, hal 133-135

kelapanya digunakan untuk berbagai peralatan rumah tangga yaitu gelas, piring, dan lainnya. Daunnya juga kadang dijadikan sebagai tikar masyarakat Nauru. Buah kelapa itu sendiri tentu saja dijadikan bahan konsumsi masyarakat Nauru, kelapa tersebut menghasilkan susu dan juga dagingnya yang akan dikupas lalu disimpan dalam gubuk kayu besar yang dipersiapkan sebagai bekal musim kemarau. Masyarakat Nauru juga memiliki tuak yang dibuat dari seludang pohon palem yang menjadikan tuak ini sebagai minuman utama masyarakat Nauru<sup>45</sup>. Tanaman pandan adalah satu-satunya tanaman budidaya yang tumbuh di Nauru dan menjadikan pandan menjadi sumber pati pada makanan masyarakat Nauru, oleh karena itu masyarakat Nauru sangat mementingkan masa penanaman serta panen dari tumbuhan pandan ini. selain menjadi sumber pati pada makanan masyarakat Nauru, daun pandan juga menjadi pakaian orang Nauru dengan menjadikannya rok pendek dari adun kering yang disebut ridi. Akar talas dan juuga sukun tidak dikenali oleh masyarakat Nauru. Masyarakat Nauru juga seringkali mengkonsumsi burubg-burung laut, namun beberapa dari mereka juga menangkap dan juga melatih burung *fregat* atau burung elang laut dan juga burung noddy untuk dijadikan hiburan dan juga dijadikan sebagai ritual keagamaan dan pantang untuk dikonsumsi.

Pada kehidupan sehari-hari masyarakat Nauru, para keluarga yang bertempat tinggal disana melakukan pekerjaan yang ada. Jika dibandingkan dengan masyarakat Banaban dan juga masyarakat Pulau Ocean, masyarakat Nauru mempunyai kehidupan yang cukup mudah. Masyarakat Nauru yang berumur masih muda menghabiskan waktu mereka untuk bergulat, berain bola, bernyanyi dan

---

<sup>45</sup> *Ibid hal 53*

menari, membuat patung tali, menenun tikar, dan juga bercinta selayaknya anak muda. Namun, pada masa kekeringan kehidupan mereka jauh lebih tenang.

### **2.2.2 Kondisi Ekonomi Nauru Sebelum Eksploitasi Fosfat**

Sebelum ditemukannya fosfat di negara Nauru, sistem ekonomi dari negara Nauru bersifat subsisten dan juga mandiri. Masyarakat lokal menggantungkan hidupnya pada hasil alam seperti ikan, burung, dan juga hasil dari pertanian lokal yaitu kelapa, pandan dan juga pisang<sup>46</sup>. Sebelum mereka mengenal ekonomi modern, tidak terdapat sistem pertanian dengan skala besar ataupun aktivitas produksi industri. Aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat lokal terhitung masih terbatas dan juga didasarkan oleh kebutuhan sehari-hari yang dipenuhi seara lokal dan alami. Masyarakatnya masih belum mengenal sistem pasar formal ataupun penggunaan uang pada kehidupan sehari-hari mereka. Pertukaran baran dan juga jasa dilakukan melalui sistem barter dan juga didasari dengan hubungan kekeluargaan. Sumber daya yang ada pada pulau Nauru ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh kelompok atau klan yang sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Hal ini menciptakan sebuah stuktur ekonomi yang setara tanpa adanya kesenjangan yang mencolok antaranggota masyarakat<sup>47</sup>.

Ketahanan pangan dijadikan sebagai ciri utama pada ekonomi pra-eksploitasi di Nauru. Masyarakat lokal dapat hidup dari alam tanpa perlu mengandalkan impor ataupun intevensi pasar internasional. Gaya hidup mereka

---

<sup>46</sup> Asian Development Bank, *Economic and Fiscal*, diakses dalam <https://www.adb.org/sites/default/files/linked-documents/48478-001-efa.pdf> (29/7/2025, 05.16 WIB)

<sup>47</sup> *Ibid hal 51*

terhitung sederhana dan selaras dengan kondisi alam. Pada masa sebelum terjadinya eksploitasi ini ekonomi masyarakat Nauru tidak merusak lingkungan karena kegiatan produksi mereka dijalani dalam skala yang kecil dan disesuaikan berdasarkan kehidupan sehari-hari saja. Ekonomi ini juga bersifat rendah akan karbon dan juga tidak menghasilkan kerusakan lingkungan yang berarti<sup>48</sup>. Keseluruhan pada sistem ekonomi tradisional ini menunjukkan bahwa sebelum terjadinya campur tangan eksternal dan juga adanya eksploitasi fosfat Nauru menggunakan model ekonomi yang berkelanjutan yang didasarkan pada hubungan rukun antara manusia dan juga alam.

Ekonomi pra-eksploitasi ini belum mengenal konsep akumulasi kekayaan, sehingga tidak adanya kesenjangan sosial yang mencolok pada struktur ekonominya. Keseimbangan yang terjadi antara produksi dan juga konsumsi lokal melahirkan sistem ekonomi yang seimbang dan selaras dengan daya dukung lingkungan. Selain itu, aktivitas ekonomi di Nauru juga bergantung pada musim dan juga cuaca<sup>49</sup>. Ketidakhadiran teknologi pada pra-eksploitasi ini membuat mereka tidak memiliki alat untuk menyimpan makanan dalam jangka waktu yang lama. Masyarakat Nauru hanya menyesuaikan ritme hidup dengan kondisi alam. Pada musim kemarau, mereka lebih mengandalkan hasil laut dan pada musim hujan mereka akan memberikan hasil bertani mereka secara melimpah. Dengan terjadinya

---

<sup>48</sup> Nick Squires, *Nauru Seeks to Regain Lost Fortunes*, diakses dalam [http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/from\\_our\\_own\\_correspondent/7296832.stm](http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/from_our_own_correspondent/7296832.stm) (19/7/2025, 00.06 WIB).

<sup>49</sup> Christopher Gregory Weeramantry, 1992, *Nauru: Environmental Damage under International Trusteeship*, Melbourne: Oxford University Press.

ketergantungan ini membuat masyarakat Nauru memiliki kedekatan antara pola ekonomi dan juga adaptasi lingkungan yang alami dan sehat.

Seperti yang telah dijelaskan pada letak geografis Nauru yang terisolasi membuat negara ini juga jarang dikunjungi dan jauh dari pengaruh luar. Sebelum terjadinya eksploitasi, Nauru juga belum mengenal pariwisata. Mereka masih belum mengetahui bahwa pariwisata ini dapat dimanfaatkan sebagai sektor ekonomi mereka. Kegiatan masyarakat yang terbatas pada ruang lingkup lokal ini membuat tidak adanya aliran pendapatan dari luar pulau. Hal ini membuat perekonomian Nauru menjadi lebih tertutup namun juga lebih tangguh pada fluktuasi eksternal walaupun mereka sangat rentan pada awal terjadinya eksploitasi secara besar-besaran.

### **2.2.3 Kondisi Lingkungan dan Iklim Pra-Eksploitasi Fosfat**

Kondisi lingkungan Nauru yang sangat subur dan mengandung banyak fosfat ini disebabkan oleh para burung-burung laut seperti tern, frigatebird, booby, tropicbird, dan juga petrel menjadi peninggalan biologis dari kekayaan fosfat di Nauru<sup>50</sup>. Dalam kurun waktu jutaan lamanya, para burung ini bersarang secara masif di Nauru, mereka bertempat tinggal pada daratan tinggi karang yang terletak tepat ditengah pulau Nauru. Para koloni burung raksasa ini secara terus menerus menghasilkan guano atau kotoran burung laut dalam presentase yang besar. Kandungan pada guano ini tidaklah sederhana, kandungan yang dimiliki oleh guano ini kaya akan fosfor dan juga nitrogen yang terakumulasi

---

<sup>50</sup> David Piper, *Geochemistry of an Insular Phosphate Deposit, Nauru, Equatorial Pacific*, Geo Science World, Vol.69, No.2 (1985), hal.296.

secara bertahap dan pada akhirnya membentuk lapisan yang tebal dan menjulang tinggi hingga 65 meter<sup>51</sup>. Guano yang ditekan dan juga pada waktu yang lama akhirnya menciptakan endapan mineralisasi yang dialami oleh guano tersebut dan pada akhirnya berubah menjadi batu fosfat, hal ini pula yang menjadikan Nauru salah satu sumber fosfat paling murni dan paling bernilai tinggi di dunia.

Secara geografis, Nauru memiliki iklim tropis dengan suhu yang cenderung hangat dan curah hujan yang seimbang. Sebelum terjadinya eksploitasi, kondisi ekologis Nauru termasuk pada golongan yang sehat dan masih alami. Pantai dan juga laut sekitar pulau ini menjadi sumber utama dari protein masyarakat. Belum ada kerusakan yang terjadi pada lingkungan sebelum eksploitasi. Ketersediaan air tawar terbatas namun masih cukup untuk masyarakatnya. Secara ekologis, susunan wilayah Nauru pada masa pra-eksploitasi didominasi oleh vegetasi tropis yang tumbuh dengan subur dan lebat pada bagian tengah pulau, hutan pantai pada sekitar garis pantai juga masih sehat dan subur<sup>52</sup>. Ekosistem pada daerah perairan juga masih terjaga, terumbu karang mereka juga sangat sehat dan menjadi bagian penting bagi masyarakat lokal untuk bahan pangan mereka. Lingkungan alam yang masih suci ini menjadi pondasi utama kehidupan masyarakat lokal Nauru.

Bentuk dari topografi Nauru ini relatif datar namun juga mempunyai dataran tinggi pada bagian tengah yang menciptakan sistem alami penyerapan air hujan meskipun tidak banyak namun cukup<sup>53</sup>. Sistem yang apa adanya ini membantu

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Linda K. Ayliffe, *Oxygen Isotopes of Phosphate and the Origin of Island Apatite Deposit*, Earth and Planetary Science Letters, vol.108, no.1-3 1992. Hal.122

<sup>53</sup> *Ibid.*

menjaga ketersediaan air tanah untuk keperluan bertani dan konsumsi domestik. Belum masuknya eksploitasi di pulau ini membuat tanah merka terjaga kesuburannya dan tidak mengalami degradasi. Lingkungan Nauru sebelum terjadinya eksploitasi menunjukkan keseimbangan dari ekologis yang terjaga baik antara manusia dan juga alamnya.

### **2.3 Awal Intervensi Kolonial dan Eksploitasi Fosfat di Nauru**

Pulau Nauru pertama kali ditemukan dan juga masuk pada catatan pelaut Eropa yang sedang berlayang pada tahun 1798, bernama Captain John Fearn. John Fearn menyebut Nauru sebagai “Pleasant Island” karena pemandangan yang ada di pulau ini sangat indah. Namun John Fearn tidak melakukan kontak langsung antara penduduk Nauru. Setelah lebih dari 90 tahun, di tahun 1888, kekaisaran Jerman secara resmi mengambil alih penguasaan atas pulau Nauru karena Jerman secara resmi mendapatkan hak atas Pulau Nauru berdasarkan pada Deklarasi Anglo-Jerman pada tahun 1886, yang membagi wilayah pengaruh antara Inggris dan Jerman pada area Pasifik Barat<sup>54</sup>. Pada 16 April 1888, Jerman mengirim kapal perang dan juga mengumumkan akan aneksasi Nauru sebagai prektorat yang pada akhirnya dimasukkan pada administrasi Kepulauan Marshall Jerman. Walaupun Inggris serta koloni Australia saat itu menentang adanya dominasi dari Jerman, mereka pun gagal mengamankan pulau kecil ini. anekasasi Jerman pun dilakukan secara simbolik serta militeristik dengan cara melucuti senjata para kepala suku. Jerman tidak hanya membawa pemerintahan kolonian mereka, namun juga

---

<sup>54</sup> Maude H.C., H.E., *The Social Organization of Banaba or Ocean Island, Central Pacific*, Journal of the Polynesian Society, Vol 41.

membuka jalan bagi eksploitasi sumber daya, terutama kopra pada saat itu. Jaluit Gesellschaft adalah perusahaan dagang milik Jerman yang menjadi aktor utama untuk mengendalikan perdagangan lokal. Namun, pada saat itu eksploitasi sumber daya belum mencapai intensitas penuh karena adanya infrastruktur yang belum berkembang dengan baik.

Kehadiran kolonial Jerman ini membawa perubahan mendasar pada struktur sosial dan juga politik masyarakat Nauru. Sistem kekuasaan adat yang sebelumnya berdasar pada otoritas kepala suku digantikan dan juga dilemahkan melalui intervensi militer dan juga hukum kolonial. Senjata api tidak lagi hanya digunakan untuk mendisiplinkan penduduk, namun juga memperparah konflik dari internal yang secara tidak langsung ikut melemahkan solidaritas tradisional masyarakat lokal<sup>55</sup>. Jerman menerapkan sistem hukum baru, menggantikan aturan lokal dengan hukum kolonial yang menempatkan kekuasaan tertinggi pada tangan administratur asing yaitu kekaisaran Jerman. Tidak hanya itu, identitas lokal dari pulau Nauru ini pun ikut tergerus dan penamaan wilayah mulai disesuaikan dengan logika administratif Eropa. Masyarakat adat yang sebelumnya hidup dengan mandiri dan juga harmoni dengan alam, mulai terpinggirkan oleh logika ekonomi kolonial yang berorientasi pada komoditas ekspor.

Meskipun secara resmi Nauru masih ada di bawah kekuasaan kolonial Kekaisaran Jerman, namun aktor utama penemu fosfat adalah Albert Ellis seorang ahli geologi yang berasal dari Selandia Baru yang bekerja pada perusahaan Inggris

---

<sup>55</sup> Wilhelm Fabricius, 1992, *NAURU 1888-1900*, Canberra: Division of Pacific and Asian History, hal.31.

yaitu *Pacific Island Company* (PIC). Pada akhir 1890-an perusahaannya memburuk dikarenakan operasi fosfatnya sudah mulai dibatasi untuk pengiriman tailing<sup>56</sup> dari beberapa pabrik sebelumnya. Hingga pada awal tahun 1900, saat itu Ellis menggantikan ayahnya yang bekerja sebagai geolog di kantor Sydney mengetahui bahwa *Pacific Island Company* mengalami kesulitan pada keuangan yang dikarenakan harga kopra yang cukup rendah dengan persediaan fosfat yang mulai tidak mencukupi. Perhatian Ellis tertuju pada sepotong “Fossilized Wood” atau kayu fosil yang digunakan untuk penahan pintu dan akhirnya memulai penyelidikan, dari penyelidikan tersebut Ellis mendapati bahwa fosil tersebut dibawa dari negara Nauru.

Pada saat itu kantor kolonial memberikan wewenang pada perwakilan PIC untuk mengunjungi pulau Ocean dan jika ditemukan adanya fosfat disana maka mereka akan menggunakan visinya yaitu “*Treat with the inhabitants and raise the flag*” yang dimana mereka akan mengambil hati penduduk dengan cara mengobati mereka dan akan mengibarkan bendera mereka sebagai tanda<sup>57</sup>. Setelah melakukan hal ini di berbagai pulau pasifik, Ellis pun bergeser pada pulau Nauru dan memastikan bahwa pulau ini memiliki fosfat yang berkualitas tinggi dengan jumlah yang besar. Temuan besar ini menarik minat dari perusahaan Inggris serta Selandia Baru dan dengan tanpa banyak hambatan mereka mulai melakukan survei dna juga penggalan di pulau Nauru.

---

<sup>56</sup> Limbah yang dihasilkan dari proses pengolahan bijih tabang yang berbentuk seperti lumpur atau atuan halus sisad dari mineral berharga seperti emas, tambaga, dan perak.

<sup>57</sup> Qalo, R.R, *Cultural Etiquette in the Pacific Island*, *Island Studies Journal*, Vol.1, No.2, Hal. 267-268.

Penggalian fosfat yang dilakukan oleh Inggris dan juga Selandia Baru ini dapat terjadi karena walaupun Jerman berkuasa secara administratif, namun mereka tidak secara langsung mengembangkan industri penambangan fosfat dan lebih bersikap tidak tegas dengan kepentingan dagang asing yang dapat mendatangkan keuntungan. Jaluit Gesellschaft yang pada tahun 1990-an itu memiliki pengaruh di Nauru juga tidak memiliki kapasitas ataupun teknologi untuk mengelola penambangan skala besar, yang pada akhirnya hal ini menjadi ruang yang dibiarkan terbuka bagi modal asing, termasuk dari negara Inggris. Dalam kondisi ini, secara tidak langsung terjadi kolaborasi yaitu Jerman yang tetap berkuasa secara politik, namun kontrol atas sumber daya fosfat perlahan bergeser pada perusahaan asing yang mulai dijalankan di bawah kekuatan kolonial Inggris.

Pada tahun 1905, industri penambangan fosfat di Nauru mulai berkembang pesat dan memerlukan bantuan tenaga kerja. Sekitar 900 buruh didatangkan dari kepulauan Gilbert dan Ellice, 50 orang berasal dari Eropa yang umumnya bertugas sebagai pengawas tambang, dan juga beberapa pekerja yang berasal dari Jepang juga ikut terlibat dalam proses penambangan<sup>58</sup>. Meskipun infrastruktur pelabuhan masih belum memadai dan proses pemuatan fosfat ke kapal besar harus dilakukan melalui perahu kecil dan menghadapi ombak besar di perairan yang terbuka, kegiatan ekspor ini pun masih tetap berjalan. Pada tahun 1905, tercatat sekitar 107.950 ton fosfat berhasil dikirim keluar dari pulau Nauru. Angka ini

---

<sup>58</sup> Julia C. Morris, *Violence and Extraction of a Human Commodity: From Phosphate to refugees in the Republic of Nauru*, *The Extractive Industries and Society*, Vol. 6, no. 4. Hal 1122-1133.

menunjukkan awal dari ekspansi industri ekstraktif secara besar-besaran di pulau kecil ini.

Pengiriman pertama fosfat sebesar 1.017 ton dibawa dari negara Nauru pada 6 Juli 1907, namun hal ini adalah awal yang buruk karena Fido karam di pantai New south Wales. Pada tahun 1907 akhir, sekitar 11.630 ton telah diekspor ke negara Australia. Pada 1908 sampai dengan 1913, rata-rata dari produksi tahunan fosfat Nauru adalah sebesar 105.000 ton. Pada kurun waktu 6 tahun tersebut saat sekitar 630.000 ton yang dikirim, pemilik tanah dari Nauru ini sudah menerima kurang dari £1.320 untuk komoditas yang bernilai sekitar 30/ton dengan total £945.000. Australia Selatan proposi area yang dipupuk terhadap total area yang diatani mulai meningkat dari 27% menjadi 81% pada tahun 1900 dan 1910. Pada tahun 1914 Australia sudah mengimpor lebih dari 173.000 ton fosfat per tahunnya yang dimana 10% dari impor tersebut berasal dari Nauru<sup>59</sup>. Sejak zaman Jerman, distribusi akan royalti fosfat yang pada saat itu sangat terbatas memungkinkan masyarakat Nauru untuk keluar dari pekerjaan mereka di tambang fosfat dan sebagian dari mereka juga mengundurkan diri dari hubungan dengan komunitas asing. Masyarakat Nauru tidak memperlihatkan minat mereka untuk bekerja di tambang mulai dari tahun 1907.

---

<sup>59</sup> R. John Morrison, Harley I. Manner, *Pre-Mining Pattern of Soils on Nauru, Central Pacific*, Pacific Science, vol.59, no.4, hal.523-540.

## 2.4 Eksploitasi Kolonial Fosfat oleh Inggris, Australia, Selandia Baru, dan Jepang di Nauru (1914-1945)

Setelah menjajah Nauru selama kurang lebih 26 tahun, kekuasaan Jerman pun berakhir pada tahun 1914 saat Perang Dunia I dimulai. Dalam waktu yang singkat Australia mengambil alih kendali atas pulau Nauru dari Jerman dan men deportasi seluruh warga Jerman yang menetap di Nauru. Pergantian kekuasaan ini membuka jalan bagi Inggris, Australia, dan juga Selandia Baru untuk menguasai Nauru, khususnya pada pengelolaan sumber daya fosfat. Kepentingan dari ketiga negara ini kemudian diformalisasi dengan dibentuknya *British Phosphate Commission* (BPC) yang menjadi lembaga gabungan dan bertugas untuk mengelola, mengeskloitasi dan juga mendistribusikan fosfat dari Nauru untuk memenuhi kebutuhan pertanian dan juga domestik negara Inggris, Australia, dan juga Selandia Baru<sup>60</sup>. Sejak 1914, eksploitasi fosfat di pulau Nauru tidak hanya sekedar berlanjut, namun meningkat secara sistematis di bawah kendali penuh kolonial baru. sementara itu, masyarakat Nauru masih berada pada posisi yang sama, yaitu tidak memiliki kendali atas proses produksi ataupun akses yang adil pada hasil keuntungan dari fosfat yang ditambang di tanah mereka sendiri.

Setelah Nauru telah diduduki sepenuhnya penambangan fosfat kembali dilakukan. Pada tahun 1914-1918 antara 53.740 dan 105.012 ton fosfat per tahunnya di kirim ke negara Australia dan Selandia Baru. angka ini jurstru lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata produksi tahunan sebesar 105.109 ton selama

---

<sup>60</sup> Merze Tate, *Nauru, Phosphate, and the Nauruans*, Australian Journal of Politics & History, vol. 14, no. 2, hal 177-192.

enam tahun sebelumnya<sup>61</sup>. Penurunan produksi ini dipengaruhi karena adanya gangguan logistik selama Perang Dunia I, namun kebutuhan fosfat sebagai bahan utama pupuk tetap menjadikan Nauru sebagai wilayah yang strategis bagi Australia dan Selandia Baru. Setelah Perang Dunia II berakhir, Nauru tidak langsung memperoleh kemerdekaan, namun menjadi wilayah dari perwalian di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dengan Australia yang bertindak sebagai otoritas pengelola. Meskipun secara formal berada di bawah sistem internasional, praktik kolonial dalam pengelolaan sumber daya ini masih tetap berlanjut dan masyarakat Nauru masih belum memiliki kontrol atas tanah ataupun hasil tambang mereka sendiri.

Kekuasaan Australia, Inggris, dan Selandia Baru atas penjajannya di Nauru ini berlangsung selama 28 tahun. Terhitung dari sejak awal pembambil alihan dari Jerman di tahun 1914 hingga pendudukan Jepang di tahun 1942. Pada awalnya Australia menjalankan pemerintahan militer sementara. Kemudian pada tahun 1919, Nauru secara resmi dijadikan sebagai wilayah Liga Bangsa-Bangsa dengan Australia yang masih menjadi pengelola utama atas nama Inggris dan juga Selandia Baru. Selama periode ini berlangsung, struktur pemerintahan dan juga sistem pengelolaan sumber daya fosfat ini sepenuhnya ditentukan oleh otoritas kolonial, yang menjalankan kekuasaan mereka tanpa adanya keterlibatan politik dari penduduk lokal.

---

<sup>61</sup> *Ibid. hal 63*

Meskipun masyarakat Nauru secara keseluruhan tidak memiliki kendali atas tanah ataupun hasil tambang yang dikelola oleh BPC, para pemilik tanah yang wilayahnya digunakan untuk penambangan fosfat ini tetap menerima royalti walaupun jumlahnya sangat kecil dibandingkan dengan nilai ekspor fosfat yang dihasilkan<sup>62</sup>. Nauru memiliki tradisi yaitu tanah adalah milik adat atau milik keluarga, bukan milik negara atau masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, yang memiliki hak untuk menerima royalti bukanlah Pulau Nauru dan juga bukan seluruh masyarakat, melainkan individu atau keluarga pemilik lahan tambang<sup>63</sup>. Dari kelompok inilah muncul inisiatif untuk mendirikan usaha bersama atas nama komunitas Nauru.

Pada tahun 1922, sebagian dari dana royalti yang diterima kelompok pemilik tambang diinvestasikan untuk membentuk *Nauru Cooperative Store* (NCS), yang menjadi toko kolektif dengan tujuan menyediakan kebutuhan masyarakat dengan harga yang stabil. Usaha ini dikelola langsung oleh masyarakat lokal dan menjalankan kebijakan yang berbeda dengan perdagangan asing, yaitu dengan menahan kenaikan harga pasar yang melonjak dan menyerap kerugian saat harga menurun. Pada tahun 1927, Dewan Kepala Suku ditunjuk sebagai Dewan Direksi toko dan omzet penjualannya pun mencapai £8.000, dengan £600 ditambahkan menjadi modal usaha. Menjelang terjadinya Perang Dunia II, NPC ini

---

<sup>62</sup> Launcelot Owen, *Notes on the Phosphate Deposit of Ocean Island*, Quarterly Journal of the Geological Society of London, vo. 79.

<sup>63</sup> David J.W. Piper, Benny J. Loebner, Paul Aharon, 1986, *Physical and Chemical Properties Deposition on Nauru Island*, Western Equatorial Pacific Ocean, dalam W.C Burnett dan S.R Riggs, *Phosphate Deposits of the World*, Cambridge: Cambridge University Press.

telah menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat lokal Nauru dengan total tabungan kolektif sebesar £18.000 pada tahun 1939<sup>64</sup>.

Penjajagan Jepang di Nauru selama Perang Dunia II ini dimulai pada 23 Agustus 1942, pada saat pasukan Jepang menyerang Nauru sebagai bagian dari ekspansi militernya di bawah wilayah pasifik. Pada saat itu Nauru masih menjadi wilayah perwalian di bawah mandat PBB yang dikelola oleh Australia atas nama Inggris dan Selandia Baru. Namun, karena adanya keterbatasan militer dan juga strategi pertahanan yang terfokus pada wilayah lain, pasukan Australia yang ditempatkan di Nauru akhirnya ditarik lebih dulu saat menjelang invasi. Akibatnya adalah tidak ada kekuatan militer yang tersisa untuk mempertahankan wilayah Nauru, sehingga Jepang dapat mengambil alih Nauru tanpa adanya perlawanan<sup>65</sup>.

Setelah Jepang berhasil menguasai pulau Nauru, Jepang kembali mengaktifkan industri penambangan fosfat yang dikelola oleh BPC. Sebelum pendudukan Jepang, BPC telah dihentikan karena meningkatnya ancaman perang pada kawasan Pasifik. Staf dan juga sebagian besar buruh dievakuasi, sementara peralatan dan juga infrastruktur tambang sebagian ditinggalkan dan juga disembunyikan. Jepang melihat nilai yang strategis dari fosfat, sehingga pemulihan produksi ini menjadi prioritas mereka. Sebanyak 72 staf dari Nanyo Takushu Kaisha (*South Sea Development Company*) dikirim ke Nauru untuk memperbaiki fasilitas

---

<sup>64</sup> Peter John Barret, *Report on Phosphate, other minerals and groundwater resources, and other aspects of rehabilitation planing and methodology*, Report, Commission of Inquiry into the Rehabilitation of the Worked-out Phosphate Lands of Nauru, vol.9

<sup>65</sup> Nauru Airlines, *Explore the War History of Nauru*, diakses dalam <https://www.nauruair.com/about-us/blog/post/explore-the-war-history-of-nauru> (29/7/2025, 05.47 WIB)

tambang. Mereka juga menemukan kembali peralatan tambang yang disembunyikan, dan pada akhirnya mempekerjakan kembali buruh yang tertinggal setelah evakuasi sebelumnya. Pendudukan Jepang ini berlangsung selama tiga tahun, sejak awal pada tahun 1942 sampai 1945, yang akhirnya Nauru diserahkan kembali pada Australia sebagai bagian dari sekutu setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II.

Dengan demikian, pulau Nauru mengalami penjajahan kolonial oleh empat kekuatan asing utama yaitu Jerman pada tahun 1888 hingga 1914 dilanjut oleh penjajahan oleh Australia, Inggris, dan Selandia Baru yaitu pada tahun 1914 hingga 1942, lalu beralih lagi ke Jepang pada 1942 hingga 1945 dan akhirnya kembali lagi dikelola oleh Australia atas nama perwalian PBB sejak 1945. Nauru dijajah selama 80 tahun lebih, dengan karakter dan juga intensitas eksploitasi yang berbeda setiap periodenya.

## **2.5 Nauru Pascakolonial: Kemerdekaan, Fosfat, dan Perubahan Internal**

Setelah Jepang akhirnya menyerah pada tahun 1945, Nauru kembali berada pada kendali Australia sebagai bagian dari sistem perwalian PBB. Pada sistem perwalian ini, negara pengelola berkewajiban untuk mempersiapkan wilayah perwalian menuju kemandirian politik dan ekonomi. Dalam kurun waktu antara 1945 hingga pada awal 1960-an, pemerintah Australia melanjutkan pengelolaan administratif atas Nauru sebagai wilayah perwalian, sementara BPC kembali mengoperasikan tambang fosfat. Eksploitasi sumber daya ini masih berjalan secara intensif, namun keterlibatan masyarakat Nauru dalam proses pengambilan keputusan ini masih sangat terbatas. Meskipun mendapatkan royalti dalam jumlah

yang tidak sepadan, mayoritas keuntungan ini masih dikendalikan oleh BPC dan juga negara kolonial. Ketimpangan ini secara perlahan mulai menumbuhkan kesadaran politik di kalangan elite lokal, yang pada akhirnya berkembang menjadi tuntutan atas hal kepemilikan dan juga pengelolaan sumber daya sendiri.

Pada pertengahan 1960-an tekanan politik dari elite Nauru semakin kuat, terutama pada figur bernama Hammer DeRoburt. Ia adalah tokoh adat dan juga politikus yang gigih dalam memperjuangkan kontrol penuh atas tanah dan juga sumber daya fosfat Nauru. Perjuangan dari Hammer sebenarnya telah berakar sejak tahun 1950-an, pada saat Austrakua mulai membentuk Dewan Pemerintahan Lokal Nauru (*Local Government Council*) pada tahun 1951 sebagai wujud awal dari pemerintahan sendiri. Struktur ini kemudian mulai berkembang lebih jauh pada tahun 1966 dengan terbentuknya Dewan Eksekutif, yang memberikan masyarakat Nauru sebuah kewenangan yang lebih luas dalam mengatur perkara domestik termasuk ekonomi mereka<sup>66</sup>.

Pada saat inilah Hammer dan juga para pemimpin lokal berhasil menekan pemerintah Australua melalui berbagai cara yaitu melalui diplomasi internasional, sidang PBB, dan juga negosiasi bilateral agar masyarakat Nauru memiliki kendali atas kekayaan alam mereka. Usaha dari Hammer dan pemimpin lainnya ini membuahkan hasil penting yaitu pada 1 Juli 1967, pengelolaan industri fosfat resmi dialihkan dari *British Phosphate Commissioners* (BPC) menjadi badan milik pemerintahan lokal Nauru yaitu *Nauru Phosphate Corporation* (NPC). Dengan

---

<sup>66</sup> FD Power, *Phosphate deposits of Ocean and Pleasant Island*, Proceedings of the Australian Institute of Mining Engineers, vol.1, no.1.

demikian proses pengambil alihan industri fosfat melalui pembentukan NPC pada tahun 1967 dapat dipandang sebagai bentuk awal kedaulatan ekonomi yang diraih sebelum pengakuan resmi atas kemerdekaan politik. Nauru pada akhirnya memperoleh kemerdekaan secara formal dan resmi pada 31 Januari 1968 dan menjadikannya sebagai negara merdeka terkecil di dunia.

Setelah memperoleh kendali penuh atas industri fosfat dan juga merain kemerdekaannya, Nauru dengan cepat mengalihkan sebagian besar pendapatannya pada sektor investasi luar negeri. Sejak tahun 1969, pemerintah Nauru mulai mendirikan maskapai nasional Air Nauru dan juga perusahaan pelayaran Nauru Pacific Line yang menjadi bentuk dari diversifikasi ekonominya<sup>67</sup>. Investasi properti juga dilakukan secara agresif oleh Nauru, termasuk pada pembangunan gedung pencakar langit yaitu Nauru House yang memiliki 52 lantai, gedung ini berada di Melbourne, Australia yang bernilai A\$45 juta. Selain itu Nauru juga memiliki hotel besar pada Kepulauan Marshall dan juga melakukan ekspansi saham pada industri fosfat di negara Filipina dan juga India. Model utama Nauru atas pembangunan ini sebagian besar terinspirasi oleh berbagai negara dengan penghasil minyak seperti Kuwait, yang menjadi panutan Nauru dalam mengelola kekayaan sumber daya alam mereka.

Pada tahun 1970-an hingga 1980-an adalah masa-masa kejayaan negara Nauru karena mereka berada pada puncak ekonomi yang belum pernah terjadi

---

<sup>67</sup> Anne Davies, Ben Doherty, *Corruption, Incompetence and a Musical: Nauru's Cursed History*, diakses dalam <https://www.theguardian.com/world/2018/sep/04/corruption-incompetence-and-a-musical-naurus-riches-to-rags-tale> (19/06/2025, 12.50 WIB).

sebelumnya. Nauru sering disebut sebagai salah satu negara terkaya di dunia berdasarkan pada pendapatan per kapita, yang mana hal ini sangatlah langka bagi negara kecil pada kawasan Pasifik. Surplus besar dari ekspor fosfat membuat pemerintah menyediakan layanan publik secara gratis. Pendidikan dan juga layanan kesehatan diberikan tanpa adanya pungutan biaya. Listrik dan juga air ikut disubsidi secara penuh, bahkan transportasi umum dan juga perumahan dibangun oleh negara untuk warganya<sup>68</sup>. Tidak hanya itu, Nauru juga menghapuskan sistem pajak dan masyarakatnya mendapatkan beasiswa dan juga tunjangan sosial lainnya. Sepanjang tahun 1970-an hingga awal 1980-an, Nauru hadir sebagai model negara kecil yang makmur karena hasil sumber daya alamnya. Namun, di balik keberhasilan yang didapatkan oleh Nauru, terdapat ketergantungan tinggi pada satu sektor yaitu fosfat, yang perlahan juga sudah mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan.

Pada akhir tahun 1980-an, adanya ketidakpastian menyelimuti masa depan Nauru. Para pengambil kebijakan mulai menyadari bahwa pasokan fosfat yang mereka miliki tidak akan bertahan lama dan berbagai langkah dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang baru. Namun, perubahan ini tidak hanya menyebabkan tantangan administratif saja, melainkan mengganggu tatanan sosial dan budaya yang sebelumnya terbentuk dari kenyamanan hidup. Pada saat harapan kesejahteraan mulai tergeser oleh realita yang lebih kompleks, maka struktur sosial

---

<sup>68</sup> S.J. Gale, *The mined-out Phosphate Lands of Nauru, Equatorial Western Pasific*, Australian Journal of Earth Sciences, Vol. 63, no. 3, (2016), hal. 340.

dan juga kekuasaan pun ikut tergeser dan membuka jalan bagi transformasi sosial dan juga politik yang akan dibahas lanjut pada bagian berikutnya.<sup>69</sup>.

### **2.5.1 Transformasi Sosial Budaya dari Masa Kolonial Hingga Pasca Eksploitasi Fosfat di Nauru**

Perubahan sosial yang terjadi di Nauru tidak terjadi dengan tiba-tiba saat Nauru sudah mengambil alih kendali fosfat, namun sudah terjadi lama dan merupakan hasil dari proses panjang adanya masa penjajahan kolonial. Pada saat Kekaisaran Jerman mulai menjajah pulau Nauru di tahun 1888, Jerman membawa sistem baru yaitu sistem politik dan ekonomi kolonial dan juga membuka jalan untuk masuknya misionaris Kristen Protestan dan juga Katolik.<sup>70</sup>. Munculnya misionaris ini tidak hanya untuk menyebarkan agama, namun juga mengubah tatanan sosial yang pada awalnya sangat berpegang teguh pada struktur adat dan spiritual lokal. Sistem pendidikan dari Barat mulai diperkenalkan melalui sekolah-sekolah misi, sementara untuk berbagai nilai komunal dan juga praktik adat mulai digantikan oleh adanya nilai individualistik dan juga religius sesuai dengan standar para kolonial Jerman. Tidak butuh waktu yang lama, relasi akan kekuasaan masyarakat Nauru ini mulai bergeser. Kepala suku yang awalnya menjadi pilar atau kiblat dalam pengambilan keputusan mulai kehilangan pengaruh dan juga

---

<sup>69</sup> -,2014. *Social Impact of Mining over the xx Century on Nauru*, Manuscript.

<sup>70</sup> Muhammad Irham, *Sejarah Singkat Negara Nauru (Laporan Baca Revisi)*, diakses pada <https://www.scribd.com/document/784378782/Sejarah-Singkat-Negara-Nauru-Laporan-baca-Revisi> (29/7/2025, 05.57WIB)

kewenangannya, baik dalam segi penghormatan adat ataupun pada pengambilan keputusan sehari-hari<sup>71</sup>.

Proses ini menjadi sebuah landasan awal perubahan sosial buaya yang lebih mendalam pada masa berikutnya. Pada saat Nauru akhirnya merdeka dan mulai mengelola industri fosfat mereka sendiri pada akhir 1960-an, masyarakatnya telah mengalami sejarah panjang pergeseran sosial yang mendalam. Struktur nilai dan juga cara hidup komunal yang dahulu mendefinisikan keseharian masyarakat Nauru juga tidak lagi berdiri dengan kokoh. Perubahan ini tidak dapat diartikan sebagai fenomena yang berdiri sendiri, namun salah satu bagian dari kesinambungan sejarah kolonisme dan modernisasi yang telah berlangsung puluhan tahun sebelumnya.

Transformasi sosial dan budaya yang dialami Nauru ini juga berdampak pada pergeseran dari identitas serta hubungan sosial dalam masyarakat. Tradisi dan juga norma yang pada awalnya sangat kuat dan mengikat komunitas ini mulai luntur dan akhirnya digantikan oleh berbagai norma baru yang lebih individualistik dan juga terstruktur oleh sistem administratif modern. Pergeseran ini juga tidak hanya pada masalah nilai, namun juga mempengaruhi mekanisme sosial di mana sebelumnya komunitas menjelankan solidaritas dan juga kerja sama secara kolektif. Sistem yang pada awalnya bersifat berbasis komunitas dan menyebar secara kolektif berubah menjadi lebih terpusat dengan adanya peran berbagai lembaga pemerintahan yang mengambil alih sebagian besar fungsi sosial dan politin hingga mengubah dinamika kekuasaan lokal secara signifikan. Adanya kondisi ini

---

<sup>71</sup> Wilhelm Fabricius, 1992, *NAURU 1888-1900*, Canberra: Division of Pacific and Asian History, hal.31.

menimbulkan ketegangan antara kelompok yang masih ingin mempertahankan tradisi lama mereka dengan mereka yang telah menerima dan mengadopsi modernisasi.

Pendidikan dan juga agama yang telah disebarkan oleh misionaris juga berperan penting dalam mengubah cara berfikir dan juga nilai masyarakat. Berbagai ajaran dari agama Kristen ini secara perlahan menggantikan kepercayaan dan juga praktik spiritual lokal yang telah mengakar selama berabad-abad. Hal ini mengubah cara pandang masyarakat terhadap alam, leluhur, dan juga makna dari kehidupan secara keseluruhan.<sup>72</sup> Sistem nilai baru yang menekankan moralitas Kristen, tata ibadah gerejawi, dan juga relasi vertikal dengan otoritas agama ini menyebabkan terjadinya peralihan peran tokoh adat dan juga pemimpin spiritual lokal. Banyak upacara tradisional dan juga sistem pengetahuan lokal yang mulai ditinggalkan oleh masyarakat, karena mereka beranggapan hal tersebut sudah tidak lagi sejalan dengan ajaran agama baru. Proses ini pun memperdalam dislokasi dari identitas budaya pada kalangan masyarakat, terutama pada generasi muda yang berada pada keadaan yang terjepit diantara dua nilai yang berbeda.

Berbagai perubahan yang terjadi di Nauru ini tidak hanya berdampak pada sosial Nauru saja, namun juga memengaruhi pola dari komunikasi serta interaksi masyarakatnya. Komunikasi yang dulunya bersifat langsung mulai berubah menjadi hubungan yang lebih formal dan juga berjarak, ini dapat terjadi karena

---

<sup>72</sup> Mexicohistory, *Understanding Social Development in Nauru: Past, Present, and Future*, diakses dalam <https://www.mexicohistorico.com/paginas/understanding-social-development-in-nauru-past-present-and-future-d44828f0.html> (22/6/2025, 20.34 WIB)

adanya struktur sosial baru yang memisahkan individu berdasarkan dengan status ataupun jabatan administratif mereka<sup>73</sup>. Dampaknya adalah melemahnya solidaritas antarwarga dan juga berdampak pada cara masyarakat berorganisasi dan juga berpartisipasi pada pengambilan keputusan. Situasi ini memperlihatkan terjadinya perubahan mendalam pada ikatan sosial yang sebelumnya menjadi fondasi kebersamaan masyarakat Nauru.

Setelah masa kejayaan fosfat berakhir pada akhir 1980-an, masyarakat Nauru memasuki fase krisis identitas yang dalam. Pada saat gaya hidup mewah yang pernah dinikmati selama dekade 1970 hingga 1980 tidak dapat dipertahankan lagi, masyarakat mulai hidup dalam ketergantungan terhadap negara mulai kehilangan arah. Ketergantungan yang awalnya bersifat ekonomi kini berkembang menjadi ketergantungan psikologis dan budaya, yang secara perlahan memengaruhi kepercayaan diri masyarakat untuk membangun masa depan secara mandiri. Memasuki tahun 1990-an masyarakat Nauru tidak lagi melihat diri mereka sebagai subjek pembangunan, melainkan sebagai penerima bantuan dari luar, terutama dari negara Australia.

Krisis ini juga membentuk mentalitas yang pasif bagi masyarakat lokal, inisiatif lokal juga tergantikan dengan harapan akan investasi internasional. Fenomena ini semakin tampak setelah tahun 2001, pada saat Nauru mulai menjalankan kerja sama pemrosesan pencari suaka dengan Australia. Bantuan asing

---

<sup>73</sup> Mary Lyn Stoll, *Environmental Colonialism*, diakses dalam <https://sk.sagepub.com/ency/edvol/sage-encyclopedia-of-business-ethics-and-society-2e/chpt/environmental-colonialism> (29/7/2025, 06.09 WIB)

yang datang bersamaan dengan pengaruh budaya Barat melalui media, pendidikan, dan institusi keagamaan membuat perubahan budaya yang tidak dapat dihindarkan. Bahasa ibu mulai ditinggalkan, praktik adat mulai melemah, dan juga identitas budaya yang dulunya menjadi fondasi sosial yang perlahan dibandingkan. Anak-anak muda Nauru lebih akrab dengan budaya luar dibandingkan dengan berbagai nilai leluhur mereka sendiri. Hal ini mencerminkan kolonialisme kultural baru yang berlangsung secara halus melalui relasi bantuan dan ketergantungan.

Selain dampak psikologis dan kultural, perubahan struktur sosial juga tampak dalam konteks keluarga dan peran gender. Sebelum eksploitasi fosfat meluas di tahun 1970-an, struktur dari keluarga yang bersifat tradisional dan kohesif, dengan peran laki-laki sebagai pencari nafkah dan perempuan yang terbatas pada ranah domestik. Namun, pada masuknya sektor formal aktif pada bidang pemerintahan, pendidikan, dan juga kesehatan. Di sisi lain hal ini menjelaskan tentang kemajuan dalam kesetaraan gender, namun di sisi lain ikatan antargenerasi mulai longgar. Berbagai nilai budaya tidak lagi diwariskan secara utuh pada keluarga karena terbentuknya sifat individualisme dan juga modernisasi yang datang melalui sistem pendidikan, teknologi, dan pola hidup global.

### **2.5.2 Pemerintahan, Kepemimpinan, dan Krisis Negara Pascakemerdekaan**

Pemerintah Nauru juga mengalami perubahan yang besar setelah kemerdekaan mereka. Namun, karena pemerintah yang tidak berfikir jangka panjang, pemerintah Nauru tidak menggunakan momentum kejayaannya ini untuk membangun sistem pemerintahan yang kuat dan juga berdaulat. Para petinggi

Nauru justru terjebak pada pola kepemimpinan yang lemah, reaktif, dan juga konsumtif<sup>74</sup>. Pada saat Nauru menyadari bahwa potensi ekonomi yang dapat dihasilkan oleh fosfat ini sangat besar, semangatnya untuk membangun politik justru diarahkan untuk menguras kekayaan fosfat secepat mungkin. Pemerintah Nauru sibuk memanen keuntungan instan daripada menyusun kebijakan jangka panjang untuk keberlanjutan negara. Berbagai keputusan yang strategis didorong oleh hasrat untuk konsumsi atau kesenangan sesaat saja dan bukan untuk memperkuat institusi atau meningkatkan kapasitas negara. Hal ini sudah jelas memperlihatkan bagaimana orientasi politik Nauru pasca kemerdekaan yang sangat minim akan visi dan kurangnya refleksi akan kerentanan dari struktural yang telah diwarisi para penjajah.

Ketergantungan mereka pada pendapatan fosfat ini menjasi kesalahan fatal yang secara perlahan menggerogoti stabilitas negara. Berbagai keputusan penting diadopsi secara reaktif dan juga terfragmentasi tidak berdasarkan perencanaan makro yang matang<sup>75</sup>. Meskipun terdapat upaya investasi di luar negeri sebagai bentuk diversifikasi, kebijakan ini justru hanya memperlihatkan kelemahan dari struktural dalam pemerintahan Nauru. Investasi yang dilakukan tanpa adanya pengawasan yang kuat dan jauh dari kebutuhan domestik rakyat Nauru. Tidak ada perencanaan pada penguatan institusi, tidak ada juga kerangka evaluasi kebijakan serta tidak adanya sistem pengendalian resiko yang terukur. Pemerintah Nauru justru

---

<sup>74</sup> Barrie Macdonald, *Nauru: Phosphate and Political Progress*, *The Journal of Pacific History*, vol.17, no.3 (1982), hal 146-157.

<sup>75</sup> Randolph R. Thaman, *Vegetation and Gilbert Island: Case Studien in Poverty, Degradation, Disturbance, and Displacement*, *Pacific Science*, vol.46

memperlihatkan kebijakan negara yang impulsif, diarahkan oleh elite penguasa, dan juga lemah pada visi pembangunan jangka panjang<sup>76</sup>.

Dengan lemahnya institusi pemerintahan Nauru pasca kemerdekaan ini menjadi ciri utama dari perubahan politik yang gagal membuahkan stabilitas. Posisi kekuasaan yang tidak didukung oleh sistem yang mapan, melainkan bergantung pada manuver elite politik yang silih berganti<sup>77</sup>. Pergantian kepala negara yang sering didominasi oleh figur tertentu menciptakan suasana politik yang rapuh dan juga mudah untuk diintervensi. Orientasi kebijakan juga sering berubah-ubah, mengikuti kepentingan politik sesaat. Tidak ada konsistensi, tidak adanya pembangunan jangka panjang yang dijaga dan juga dilanjutkan secara konsisten oleh tiap rezim pemerintahan. Sistem birokrasi di Nauru juga tidak dibangun secara profesional, yang menyebabkan negara Nauru lebih mirip dengan instrumen kekuasaan kelompok tertentu dibandingkan dengan wadah pelayanan publik.

Kondisi yang dialami negara Nauru ini menimbulkan berbagai persoalan struktural dalam penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan yang disusun seringkali tidak melibatkan partisipasi publik dan minim akan akuntabilitas<sup>78</sup>. Pemerintah Nauru lebih memilih untuk menjaga citra atau memperpanjang kekuasaan daripada merancang reformasi kelembagaan yang sejati. Ketiadaan visi negara ini menjadikan pembangunan hanya bersifat simbolik, yaitu membangun infrastruktur

---

<sup>76</sup> *Ibid.* hal 49

<sup>77</sup> The World Factbook, *Countries Nauru*, diakses dalam <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/nauru/> (18/7/2025, 01.56 WIB).

<sup>78</sup> Anna F Sennott, *Environmental Degradation as a Result of Colonization*, diakses dalam <https://storymaps.arcgis.com/stories/193e1faf0a3a46718bc3578b2e71d3d6> (29/7/2025, 06.12 WIB)

tanpa fondasi, mengeluarkan anggaran tanpa prioritas, dan juga menjalankan administrasi tanpa adanya peta jalan. Pada saat krisis mulai menghantam dan juga kebutuhan rakyat tidak terpenuhi, maka kepercayaan terhadap pemerintah pun ikut runtuh. Negara ini gagal menunjukkan kapasitas untuk merespons dan kelemahan institusi juga ikut memperburuk jarak antara pemerintah dan juga rakyat.

Salah satu aspek lain dari kegagalan pemerintah Nauru Pascakemerdekaan adalah karena kebijakan populis yang terlalu optimis terhadap kelangsungan kekayaan fosfat. Sejak awal tahun 1970-an, terutama setelah pemerintah resmi mengambil alih NPC, pemerintah mulai membebaskan warganya dari kewajiban membayar pajak. Pemerintah Nauru juga menyediakan berbagai layanan sosial seperti pendidikan, perawatan, kesehatan, air, dan listrik secara gratis. Pada awal 1980-an, lebih dari separuh angkatan kerja lokal dipekerjakan langsung oleh pemerintah ataupun entitas fosfat negara. Hal ini memperlihatkan bahwa mentalitas negara dengan julukan “superkaya” yang sangat bergantung pada satu komoditas tanpa adanya perancangan ketahanan jangka panjang.

Negara Nauru lebih berguna sebagai instrumen distribusi pendapatan fosfat daripada sebagai institusi pelayanan publik yang berorientasi pada masa depan. Fungsi birokrasi tidak diarahkan untuk membentuk sistem tata kelola yang stabil namun malah menjadikan saluran pembagian kekayaan. Mentalitas ini berakar kuat pada dekade 1970-an hingga akhir 1980-an, masa di mana harga fosfat di dunia masih tinggi dan pendapatan negara mencapai puncaknya. Namun begitu memasuki dekade 1990-an dan awal 2000-an pada saat cadangan fosfat mulai menipis dan juga pengelolaan keuangan negara bermasalah, struktur ini tidak mampu bertahan.

Kebijakan simbolik, termasuk pada pelayanan negara yang sangat loyal dan akhirnya menciptakan persepsi keliru bahwa negara akan selalu mampu memenuhi kebutuhan rakyat tanpa kerja keras institusional yaitu ilusi yang kemudian runtuh bersama krisis fiskal dan sosial.

## **2.6 Situasi Nasional Nauru Setelah Eksploitasi Fosfat**

Setelah Nauru melalui masa keemasan ekonomi akibat ekspor fosfat, Nauru memasuki babak baru yang penuh dengan tantangan begitu cadangan fosfat mulai terkeruk habis pada akhir 1980-an. Negara yang dijuluki sebagai negara kecil di dunia ini menghadapi kenyataan bahwa kelimpahan sumber daya yang mereka andalkan selama ini tidak bersifat berkelanjutan. Penambangan fosfat yang berlangsung selama lebih dari satu abad ini tidak hanya mengikis kekayaan alamnya saja, namun juga melemahkan fondasi sosial, ekonomi, dan juga lingkungan dari Nauru. Pada saat sumber daya utama mereka habis, mereka tidak memiliki alternatif lain yang siap untuk menopang kehidupan masyarakat ataupun keberlangsungan negara.

Kondisi ini memperlihatkan rentannya struktur nasional Nauru dalam menghadapi perubahan drastis. Ketergantungan Nauru pada komoditas fosfat ini mengakibatkan Nauru terjebak pada siklus eksploitasi tanpa adanya diversifikasi ekonomi yang memadai. Dalam situasi ini, semakin banyak hal yang memburuk, pemerintah Nauru pun mencoba mencari keadilan melalui jalur hukum internasional dan menuntut tanggung jawab dari negara bekas pengelola fosfat. Di sisi lain, masyarakat lokal sudah mulai merasakan langsung dampak dari kerusakan

lingkungan dan juga krisis ekonomi, termasuk melalui peningkatan angka pengangguran, krisis pangan, dan juga memburuknya kondisi kesehatan.

### 2.6.1 Gugatan Hukum Internasional Nauru Terhadap Australia

Penipisan cadangan fosfat secara drastis secara langsung membatasi pilihan politik dan juga ekonomi masyarakat Nauru. Dampak dari kerusakan lingkungan secara permanen ini menjadikan masyarakat Nauru ini menjadi korban utama dari eksploitasi kolonial yang berkepanjangan. Cara pemerintah Nauru yang dipimpin oleh Hammer DeRoburr untuk menanggapi hal ini adalah dengan cara menunjuk Prof. V.S Mani sebagai sekretaris utama penasihat umum bersama dua pakar hukum internasional yang terkemuka di Inggris yaitu Brownlie dan juga Michael Crawford.<sup>79</sup> Ketiga orang ini memimpin tim hukum Nauru yang secara resmi mengajukan gugatan terhadap Australia ke *International Court of Justice* (ICJ) atau Mahkamah Internasional pada tanggal 19 Mei 1989.

Dasar utama dari gugatan ini adalah untuk merujuk pada laporan Komisi Penyelidikan Independen mengenai tanggung jawab internasional atas penambangan fosfat di Nauru yang disusun pada tanggal 3 Desember 1986<sup>80</sup>. Temuan utama dari komisi ini menyatakan bahwa kepentingan dari komisi fosfat Inggris ini adalah sebagai agen dari berbagai negara mitra pengelola yang telah didahulukan atas kepentingan finansial, ekologis, dan juga politik rakyat Nauru. Nauru berargumen bahwa selama masa perwalian mereka, Australia telah melanggar beberapa kewajiban hukum internasional, termasuk dengan Perjanjian

---

<sup>79</sup> Gil Marvel Tabucanon, *The Resettlement of Nauruans in Australia*, *The Journal of Pacific History*, vol.46, no.3 (2011)

<sup>80</sup> *Ibid.*46.

Mandat dan Perwalian atas Nauru, serta prinsip penentuan nasib sendiri sebagaimana yang tercatat pada pasal 76 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Selain itu, Nauru juga melemparkan tuduhan pada Australia karena melanggar asas-asas keadilan, kewajiban dan juga prinsip umum dari hukum lingkungan. Secara khusus Nauru juga menekankan pelanggaran pada prinsip *Permanent Sovereignty over Natural Resources* (PSNR), yaitu hak kedaulatan permanen atas kekayaan alam mereka<sup>81</sup>. Berdasarkan dua poin utama, Nauru menuntut kompensasi yaitu, pertama bahwa Australia telah menambang habis sumber daya paling berharga milik Nauru tanpa adanya imbalan hasil yang sepadan, dan yang kedua adalah bahwa Australia gagal dalam melakukan rehabilitasi terhadap lahan yang telah rusak akibat terjadinya penambangan. Oleh karena itu, Nauru pun meminta pada pengadilan dan menyatakan bahwa Australia harus membayar ganti rugi atas kerugian lingkungan dan juga sosial ekonomi yang telah ditimbulkan selama penjajahannya.

Pada tanggal 26 Juni 1992, ICJ memutuskan bahwa mereka memiliki yurisdiksi untuk memproses kasus ini dengan cara yang resmi dan dikenal sebagai *Certain Phosphate Lands in Nauru*. Keputusan ini sangat penting, karena untuk pertama kalinya Mahkamah Internasional menyatakan ketersediaannya untuk menilai substansi gugatan mengenai tanggung jawab negara perwalian<sup>82</sup>. Kewajiban fidusia menjadi elemen yang penting pada gugatan ini. Pada konteks hukum internasional, kewajiban fidusia merujuk pada tanggung jawab negara perwalian ataupun

---

<sup>81</sup> International Court of Justice, *Written Statement of Nauru*, diakses dalam <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/80/11275.pdf> (19/6/2025, 20.03).

<sup>82</sup> International Court of Justice, *Certain Phosphate Lands in Nauru (Nauru v. Australia)*, diakses dalam <https://www.icj-cij.org/case/80> (19/6/2025, 20.45).

pengelola untuk bertindak demi kepentingan terbaik pada wilayah yang mereka kuasai, bukan hanya untuk keuntungan mereka sendiri.

Dalam hal ini Australia yang berperan sebagai bagian dari negara pengelola fosfat bersama Inggris dan Selandia Baru memiliki kewajiban hukum dan juga moral untuk menjaga kesejahteraan Nauru dan juga melindungi lingkungan hidupnya<sup>83</sup>. Namun pada kenyataannya, kepentingan ekonomi dari berbagai negara mitra ini justru lebih siutamakan, yang pada akhirnya terjadi pelanggaran pada kewajiban fidusia dna menjadi salah satu argumen kunci dalam pembentukan kasus hukum Nauru di ICJ. Sebelumnya, Nauru telah mencoba untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui negosiasi bilateral, tetapi Australia menolak dengan tegas atas tanggung jawabnya dan pada akhirnya negosiasi ini tidak menemukan jalan keluar. Meskipun begitu, kekuatan dar argumen hukum Nauru, yang didukung dengan data lingkungan dan juga prinsip hukum internasional, berhasil memaksa Australua untuk menyusun dokumen balasan.

Australia akhirnya mengajukan beberapa keberatan bahwa Nauru telah menyetujui metode penyelesaian lain, selanjutnya adaah Nauru telah melepaskan hak klaim rehabilitasi sejak tahun 1967, bahwa Nauru telah lama menunda gugatan sehingga dianggap telah melampaui batas waktu yang wajar, dna yang terakhir adalah bahwa Majelis Umum PBB telah mengakhiri perwalian tanpa menyisipkan kewajiban rehabilitasi<sup>84</sup>. Namun, argumen yang diberikan oleh Australia ini giyah

---

<sup>83</sup> Robert C. Kiste, *History of Nauru*, Britannica, diakses dalam <https://www.britannica.com/place/Nauru/History> (20/06/2025. 01.27).

<sup>84</sup> *Ibid.hal 73*

oleh berbagai fakta lapangan. Sejak tahun 1939, Australia telah menyadari tingkat kerusakan lingkungan yang terjadi di Nauru. Pada 1948, pemerintah Australia menyampaikan laporan resmi kepada Dewan Perwalian yang menyatakan bahwa seluruh wilayah di Nauru kecuali garis pantainya akan menjadi tanah mati yang tidak dapat dihuni ataupun diolah jika tidak adanya rehabilitasi secara serius<sup>85</sup>.

Kerusakan lahan yang telah diberikan oleh Australia sangatlah ekstrem, di mana lanskap Nauru berubah menjadi hutan puncak batu kapur dengan ketinggian antara 5 hingga 15 meter. Tanah mereka menjadi tandus dan tidak dapat digunakan untuk pemukiman, pertanian, ataupun keperluan lainnya. Penderitaan ekologis yang dialami Nauru ini menjadi inti dari gugatan Nauru<sup>86</sup>. Pada 10 Agustus 1993, kedua negara ini yaitu Australia dan juga Nauru mencapai kesepakatan damai melalui perjanjian *Compact of Settlement*. Australia akhirnya memberikan kompensasi pada Nauru sebesar 107 juta dolar Australia, yang dibayarkan secara bertahap selama 20 tahun yaitu pada tahun 1993 hingga 2013<sup>87</sup>. Jangka waktu ini bukan mencerminkan lamanya masa eksploitasi kolonial, namun skema pembayaran yang disepakati oleh kedua negara.

Dengan Australia yang menyetujui penyelesaian ini, Australia diduga ingin menghindari preseden hukum internasional yang dapat membuka pintu untuk gugatan yang serupa dari negara-negara yang telah mereka jajah. Sebagai

---

<sup>85</sup> Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

<sup>86</sup> Australian Treaty Series, *Australian Treaty Series 1994 No 15*, diakses dalam <https://www.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/other/dfat/treaties/1994/15.html> (29/7/2025, 06.18 WIB)

<sup>87</sup> *Ibid.*

imbalannya, Nauru pun melepaskan hak untuk mengajukan klaim tambahan di masa yang akan datang. Pada 9 September 1993, kedua negara ini pun resmi mengajukan permohonan penghentian proses hukum di ICJ.

Diluar dari penyelesaian finansial, kasus ini juga memperkuat akan pentingnya prinsip dari *Permanent Sovereignty over Natural Resources* (PSNR) dalam hukum internasional. Walaupun gugatan antara Nauru dan Australia resmi dihentikan melalui perjanjian damai, namun beberapa prinsip hukum yang mendasari gugatan tersebut tetap menunjukkan persoalan mendasar mengenai kedaulatan dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya. PSNR ini menyatakan bahwa setiap negara berdaulat memiliki hak penuh dan juga tetap atas sumber daya alam yang berada pada wilayahnya dan juga berhak untuk mengelola sumber daya tersebut sesuai hukum nasional tanpa adanya intervensi asing<sup>88</sup>. Pada konteks kolonialisme, prinsip ini menentang legitimasi pengambil alihan sumber daya oleh kekuatan asing atas nama hak yang diperoleh “*Acquired Rights*”. Banyak negara maju yang sering menggunakan dalih ini untuk menuntut agar negara berkembang tetap menghormati konsesi tambang ataupun izin eksploitasi dari masa kolonial, meskipun hal itu dapat merugikan kepentingan nasional<sup>89</sup>.

Pada fenomena yang terjadi di Nauru, Australia berusaha untuk membenarkan penguasaan fosfat melalui warisan hal yang dibeai dari perusahaan

---

<sup>88</sup> Telesphory D.B Magogo, *THE PRINCIPLE OF PERMANENT SOVEREIGNTY OVER NATURAL RESOURCES (PSNR) VIS-A VIS BENEFITS FROM EXTRACTIVE INVESTMENTS: A HIGHLIGHT ON NATURAL RESOURCES INVESTMENT ARRANGEMENTS*, International Journal of Legal Developments and Allied Issues, vol.6, no.1 hal 10-11.

<sup>89</sup> UK Parliament, diakses pada <https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1920/jun/16/nauru-island-agreement-bill> (17/6/2025. 11.03 WIB).

Jerman yaitu Jaluit-Gessellschaft, namun klaim tersebut tidak memiliki dasar. Jaluit-Gessellschaft hanya memiliki hak untuk menambang, namun tidak ada hak atas fosfat itu sendiri. Maka, fosfat yang ada di Nauru secara hukum dan juga moral adalah milik masyarakat Nauru. Dengan demikian, gugatan Nauru di ICJ menjadi tidak hanya perlawanan hukum terhadap Australia saja, namun juga menjadi simbol dalam perlawanan terhadap warisan kolonialisme yang masih mengakar pada struktur global pengelolaan sumber daya alam.

### **2.6.2 Perubahan Struktur Ekonomi Nauru Pasca Eksploitasi Fosfat**

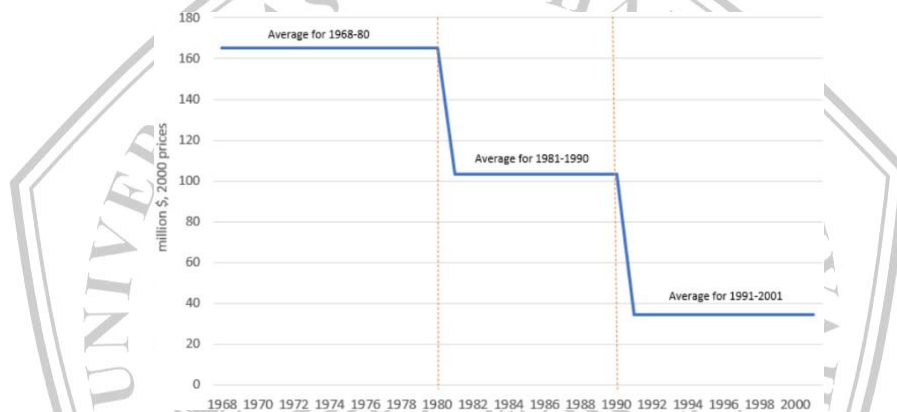
Pada saat negara Nauru mencapai kemerdekaan mereka pada tahun 1968, kurang lebih masyarakat menikmati kekayaannya selama dua dekade selanjutnya yaitu pada tahun 1968 hingga 1988<sup>90</sup>. Pendapatan negara Nauru yang sangat tinggi dan masyarakatnya pun merasakan standar hidup yang jauh melampaui negara-negara kecil lainnya. Pemerintah tidak lagi mengenakan pajak pendapatan, menyediakan pendidikan dan layanan kesehatan gratis dan juga menjadi pemberi kerja utama bagi masyarakatnya. Namun, kemakuran yang dialami Nauru ini disertai dengan pola konsumsi masyarakatnya yang berlebihan dan minim akan perencanaan jangka panjang. Berbagai barang mewah seperti mobil sport pun diimpor, meskipun seluruh pulau Nauru dapat dikelilingi hanya dalam waktu 20 menit.

---

<sup>90</sup> Alexis Carey, *How Nauru Squandered its Staggering Fortune and Ended Up Bankrupt*, diakses dalam <https://www.news.com.au/finance/money/wealth/how-nauru-squandered-its-staggering-fortune-and-ended-up-bankrupt/news-story/02862341e1b05de55845410cde9a56> (21/6/2025, 14.05 WIB)

Kebijakan fiskal negara juga lebih difokuskan pada belanja konsumtif dibandingkan dengan pembangunan yang struktural. Kejadian ini menunjukkan bahwa kekayaan fosfat ini tidak diarahkan untuk memperkuat ekonomi jangka panjang, melainkan hanya menopang gaya hidup mewah yang tidak berkelanjutan. Kondisi ini kemudian membawa Nauru pada masa krisis yang sangat tajam pada dekade berikutnya, seiring dengan habisnya cadangan fosfat dan tidak adanya sektor ekonomi alternatif yang dimiliki oleh Nauru.

**Gambar 2. 2 Penurunan Ekonomi Nauru**



Sumber : <https://devpolicy.org/nauru-riches-to-rags-to-riches-20210412/>

Setelah merasakan masa kejayaan sebagai salah satu negara terkaya di dunia pada akhir abad ke-20 berkat ekspor fosfat, Nauru mengalami keterpurukan ekonomi yang drastis akibat ketergantungannya pada satu komoditas ini. Tidak adanya strategi diversifikasi ekonomi serta kegagalan dalam mengelola pendapatan fosfat menyebabkan Nauru tidak memiliki cadangan pembangunan pada saat sumber dayanya sudah mulai menipis di akhir 1990-an<sup>91</sup>. Dana besar yang didapatkan dari ekspor fosfat ini lebih banyak dihabiskan untuk konsumsi jangka

<sup>91</sup> Peter Dauvergne, *Environmentalism of the Rich*, The MIT Press, hal. 35.

pendek, proyek luar negeri yang gagal, dan juga investasi yang tidak produktif. Pemerintah juga tidak mengalokasikan kekayaan fosfat mereka untuk membangun sektor-sektor strategis seperti pertanian, pendidikan, dan juga jasa<sup>92</sup>. Pada saat cadangan fosfatnya mulai habis, Nauru terjebak pada krisis fiskal akut tanpa adanya fondasi ekonomi alternatif. Situasi ini mendorong pemerintah mulai mencari sumber pendapatan baru secara cepat dan instan, yang pada akhirnya menyebabkan kebijakan ekonomi yang kontroversial.

Pada saat cadangan fosfat Nauru sudah menipis dan pendapatan negara jatuh, pemerintah Nauru mulai mencari alternatif pemauskan yang cepat dan juga instan. Salah satu langkah yang diambil adalah menjadikan Nauru sebagai pusat perbankan lepas pantai atau *Offshore Banking* yang mulai diterapkan pada 1998<sup>93</sup>. Dalam kebijakan ini, pemerintah menerbitkan lisensi untuk ratusan bank asing, yang sebagian besar tidak memiliki kantor fisik dan hanya beroperasi secara virtual. Tujuan utamanya adalah untuk menarik arus dana asing sebagai sumber pendapatan baru pasca fosfat. Perbankan lepas pantai adalah praktik umum di negara-negara kecil yang menawarkan resim pajak rendah atau bebas pajak, dengan jaminan kerahasiaan informasi keuangan dan juga kemudahan untuk transaksi lintas negara<sup>94</sup>.

---

<sup>92</sup> *Ibid.* hal 66

<sup>93</sup> Asian Development Bank, *Pacific Finance Sector Brief: Nauru*, diakses dalam <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/530246/pacific-finance-sector-nauru.pdf> (21/6/2025, 14.35 WIB).

<sup>94</sup> Muhammad Muhajir Aminy, Muhammad Johari, *Offshore Bank: Pengenalan Singkat dan Kejahatan Keuangan Internasional yang Terkait*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 10, No. 1 (2019), hal. 98-99.

Namun, karena lemahnya pengawasan dan juga tidak adanya infrastruktur regulasi yang kuat membuat sistem ini menjadi rawan untuk disalahgunakan. Laporan dari *Financial Action Task Force* (FATF) menunjukkan bahwa ratusan juta dolar dana gelap mengalir melalui sistem keuangan Nauru. Pada tahun 2000, Nauru akhirnya dimasukkan pada daftar hitam FATF sebagai negara non-kooperatif dalam upaya pemberantasan kejahatan keuangan global. Tekanan dari berbagai pihak internasional, termasuk negara Amerika Serikat dan juga Australia ini mendorong Nauru untuk mengehentikan praktik ini. Pada tahun 2003, seluruh bank offshore ini mulai ditutup dan pada tahun 2005 sistem ini dihentikan secara resmi.

Sejak awal dekade 2010-an hingga pertengahan tahun 2020-an, sebagian besar masyarakat Nauru bekerja pada sektor pemerintahan dan layanan publik. Ini menjelaskan bahwa keterbatasan struktur ekonomi domestik yang tidak mampu menyediakan keberagaman lapangan kerja secara mandiri. Pemerintah menjadi pemberi kerja utama, mempekerjakan masyarakat lokal sebagai pegawai negeri, tenaga pengajar, tenaga kesehatan, staf administrasi, dan juga pekerja di badan usaha milik negara seperti Ronphos Corporation dan Eigigu Holdings. Ronphos Corporation (Republic of Nauru Phosphate Corporation) adalah perusahaan negara yang menangani pengelolaan sisa industri fosfat pasca eksploitasi besar-besaran pada masa kolonial.<sup>95</sup> Sementara itu, Eigigu Holdings beroperasi pada sektor konstruksi, logistik, dan juga transportasi.

---

<sup>95</sup> Republic of Nauru, *RONPHOS Act 2005*, diakses dalam <https://nauru.tradeportal.org/media/RONPHOS%20Act%202005.pdf> (21/6/25, 21.14 WIB)

Sejak tahun 2012, pemerintah Nauru mulai menjalin kerjasama yang resmi dengan Australia dalam program penahanan pencari suaka melalui pendirian fasilitas bernama *Nauru Regional Processing Centre (RPC)*. Fasilitas ini adalah bagian dari kebijakan imigrasi Australia yang menempatkan para pencari suaka di negara ketiga sebagai tempat pemrosesan sebelum diputuskan status imigrasi mereka. Sebagai imbalannya, Australia memberikan Nauru dukungan keuangan yang signifikan, termasuk melalui pembiayaan operasional dan penyediaan lapangan kerja lokal<sup>96</sup>. Banyak masyarakat Nauru yang terlibat sebagai petugas keamanan, pekerja logistik, tenaga kebersihan, dan juga staf layanan dukungan pada fasilitas tersebut.

Walaupun RPC pernah ditutup sementara pada pertengahan tahun 2023, operasionalnya kembali berjalan dan meningkat pada tahun 2024 seiring dengan adanya perpanjangan kerjasama bilateral antara kedua negara. Fasilitas ini secara tidak langsung menjadi tulang punggung ekonomi Nauru, terutama pada kondisi saat sektor lain tidak dapat menyerap tenaga kerja lokal secara optimal. Kerjasama ini menjelaskan bentuk baru dari ketergantungan ekonomi Nauru pada negara lain.

Selain pada sektor formal, sedikit dari masyarakat Nauru juga masih memiliki aktivitas pertanian dan juga perikanan namun pada skala kecil mengingat 80% lahan di negara ini sudah hancur dan juga tidak bisa ditanami lagi. Mereka yang bekerja pada sektor pertanian dan juga perikanan hanya untuk memenuhi kebutuhan dari konsumsi lokal saja. Produk yang biasanya mereka hasilkan adalah

---

<sup>96</sup> Larasati Caesar Utoro, *Motivasi Bantuan Luar Negeri Australia untuk Nauru Tahun 2009-2015*, Skripsi, Bandung: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan.

kelapa, buah-buahan tropis, dan juga sayur-mayur<sup>97</sup>. Alasan lain mengapa sektor ini hanya berjalan pada skala kecil selain alasan keterbatasan lahan subur, masyarakat Nauru juga tidak bisa mengembangkannya karena kekurangan dukungan teknologi yang canggih. Di sisi lain, ada juga masyarakat Nauru yang bekerja sebagai tenaga kerja musiman di luar negeri, terutama pada negara Australia dan juga Selandia Baru. Mereka bekerja melalui program dari kerjasama regional yang menempatkan mereka ada bagian pertanian, holkulturam serta industri pengolahan makanan<sup>98</sup>. Program ini juga menjadi salah satu alternatif penting bagi masyarakat Nauru untuk mendapatkan penghasilan pada konteks ekonomi dalam negeri yang masih sangat terbatas.

### **2.6.3 Kerusakan Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat**

Eksploitasi fosfat yang dilakukan secara masif selama lebih dari satu abad telah mengubah sebagian besar permukaan daratan Nauru menjadi lahan yang tandus dan juga tidak produktif. Cadangan fosfat yang mulai habis pada tahun 1990-an dan terjadinya krisis ekonomi nasional mulai memburuk dan masyarakat Nauru juga sudah kehilangan kemampuan untuk bercocok tanam secara lokal. Mereka tidak lagi memiliki akses pada sistem pangan tradisional yang dulunya menjadi sumber nutrisi utama. Pada saat kondisi ekonomi Nauru mulai memburuk, masyarakat hanya mampu mengandalkan makanan impor yang murah seperti mi

---

<sup>97</sup> Jackie De Burca, *Nauru Biodiversity: Animal and Plant Species and What is Under Threat*, diakses dalam <https://constructive-voices.com/nauru-biodiversity/> (22/6/2025, 20.01 WIB)

<sup>98</sup> Arif Satriawan, *Kebijakan Indonesia Membuka Hubungan Diplomatik Dengan Negara-Negara Kawasan Pasifik (Tavalu, Nauru, Kiribati)*, diakses dalam <https://media.neliti.com/media/publications/116799-ID-kebijakan-indonesia-membuka-hubungan-dip.pdf> (22/6/2025, 20.10 WIB)

instan, daging olahan, dan makanan kaleng yang memiliki kualitas rendah dan kurang akan gizi namun memiliki kandungan lemak dan natrium yang tinggi<sup>99</sup>.

Perubahan drastis pada pola konsumsi ini telah mendorong lonjakan kasus Penyakit tidak menular (PTM), terutama pada obesitas, diabetes tipe 2, dan juga penyakit kardiovaskular<sup>100</sup>. PTM adalah jenis penyakit yang tidak menular antar individu, namun berkembang dengan perlahan karena adanya faktor dari gaya hidup tidak sehat, lingkungan, dan juga predisposisi genetik<sup>101</sup>. Yang terjadi di Nauru adalah faktor lingkungan sangat dominan yang membuat masyarakat terdorong untuk mengonsumsi makanan dengan tinggi gula dan lemak karena faktor harga dan juga keterbatasan dalam pilihan makanan. Hal ini juga diperparah karena minimnya akses edukasi akan kesehatan dan juga buruknya layanan kesehatan dasar, sehingga pencegahan dan juga penanganan dari PTM ini tidak berjalan dengan efektif<sup>102</sup>.

---

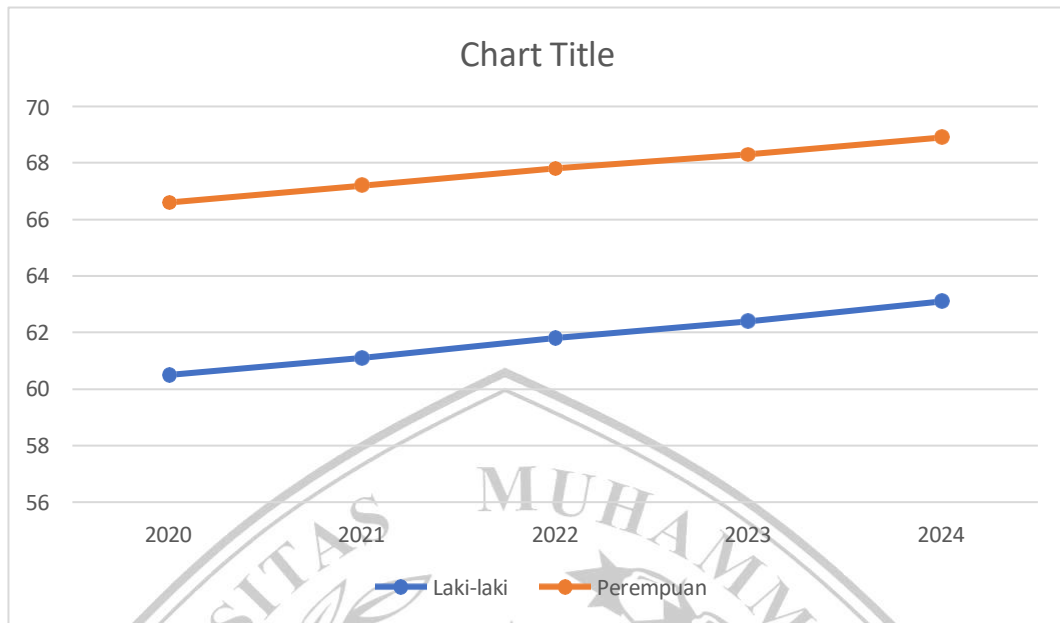
<sup>99</sup> Deborah Gewertz, Fredrick Errington, *Flap Foof Nations in the Pacific Island*, Berkeley: University of California Press

<sup>100</sup> Amy K. McLennan, *Local Food, Imported Food, and the Failures of Community Gardening Initiatives in Nauru*, dalam M. Wilson, *Postcolonialism, Indigeneity and Struggles for Food Sovereignty: Aklternative Food Networks in Subaltem Spaces*, Oxford: Routledge, hal.127-145.

<sup>101</sup> *Ibid.*

<sup>102</sup> Michael A Clark, Marco Springmann, et.all, *Multiple Health and Environmental Impacts of Foods*, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 116, No. 46, (2019), hal. 3.

**Gambar 2. 3 Prevalensi Persenan Obesitas di Nauru 2020-2024**



Sumber : <https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/oceania/micronesia/nauru/>

Nauru pernah menjadi peringkat pertama di dunia dengan tingkat obesitas yang tinggi, lebih dari 70% orang dewasa di Nauru mengalami obesitas. Pada tahun 2020 prevalensi<sup>103</sup> obesitas mencapai 66.6% perempuan dewasa dan 60.5% laki-laki dewasa di negara ini memiliki penyakit obesitas, presentase ini akan selalu naik setiap tahunnya<sup>104</sup>. Selama lima tahun berikutnya, angka obesitas pada kedua jenis kelamin ini mengalami peningkatan secara bertahap. Pada tahun 2024, tingkat obesitas pada laki-laki menyentuh angka 63,1% sedangkan pada perempuan mencapai angka 68,9%. Tingkat obesitas pada perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki – laki di sana. Hal ini dikarenakan postur tubuh besar

<sup>103</sup> Istilah prevalensi merujuk pada proporsi atau presentase populasi yang mengalami suatu kondisi ataupun penyakit tertentu pada periode waktu tertentu

<sup>104</sup> Global Nutrition Report, *Nauru*, diakses dalam <https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/oceania/micronesia/nauru/> (23/6/2025, 01.53 WIB)

terutama bagi perempuan dulu dianggap sebagai simbol kesejahteraan dan juga kecantikan, angka diabetes perempuan yang lebih tinggi dari laki – laki ini juga didorong karena perempuan di Nauru hanya terlibat sedikit dalam aktivitas fisik. Peningkatan dari obesitas masyarakat Nauru ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik masyarakatnya saja, namun juga pada konsekuensi psikologis dan sosial yang signifikan. Banyak individu yang mengalami obesitas dan menghadapi stigma sosial baru yang menyebabkan adanya penurunan harga diri, depresi, dan juga kecemasan.

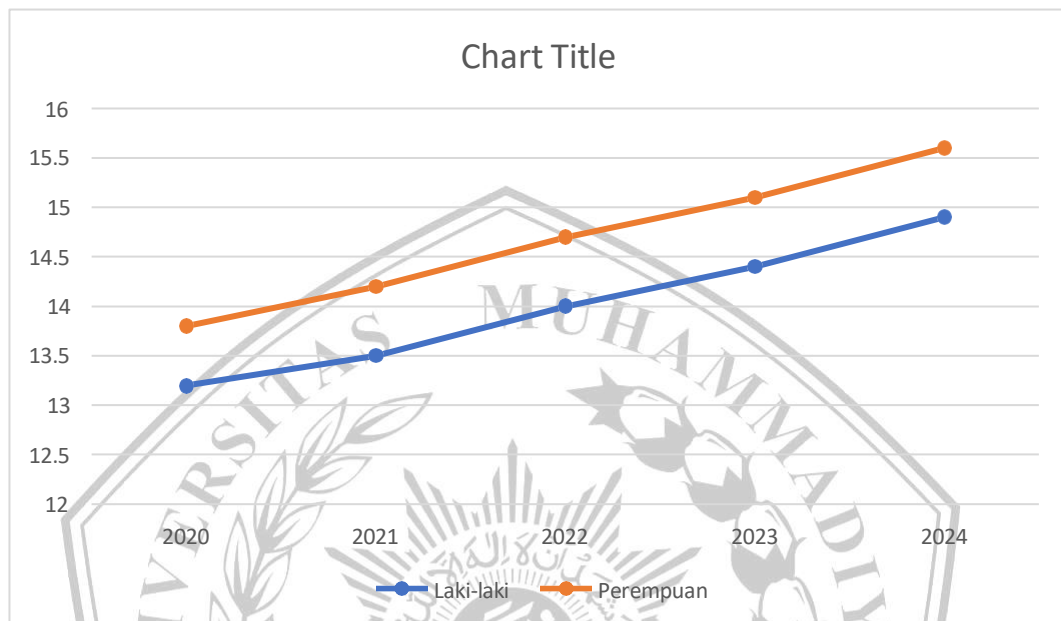
Obesitas yang terjadi di negara Nauru ini juga meningkatkan risiko bagi berbagai penyakit tidak menular lainnya, termasuk diabetes tipe 2, penyakit jantung, hipertensi dan juga penyakit tidak menular lainnya. Dengan meningkatnya prevalensi obesitas di negara ini, tantangan baru yang besar akan dihadapi lagi untuk masyarakat Nauru yaitu pada hal biaya perawatan kesehatan dan juga produktivitas, yang dapat menghambat kesejahteraan sosial. Kurangnya aktivitas fisik yang terjadi karena masyarakatnya telah terbiasa mendapatkan bantuan negara juga berkontribusi pada peningkatan obesitas di negara Nauru. Banyak masyarakatnya yang menghabiskan waktu mereka di dalam ruangan dan terjebak dalam gaya hidup yang lebih sedentari<sup>105</sup>. Kombinasi antara pola makan yang tidak sehat dan juga kurangnya aktivitas fisik ini melahirkan sebuah lingkaran yang sulit untuk dipecahkan, dimana nantinya tingkat obesitas akan memperburuk kesehatan

---

<sup>105</sup> Sedentari adalah gaya hidup dengan aktivitas fisik yang sangat minim, di mana seseorang banyak menghabiskan waktu dengan duduk atau berbaring diluar waktu tidur, yang menyebabkan kalori di tubuh terbakar dengan jumlah yang sedikit.

fisik dan mental masyarakat dan pada akhirnya akan mengurangi motivasi mereka untuk berolahraga dan juga mengonsumsi makanan yang lebih sehat<sup>106</sup>.

**Gambar 2. 4 Prevalensi Persenan Penyakit Diabetes di Nauru 2020-2024**



Sumber : <https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/oceania/micronesia/nauru/>

Selain tingginya penyakit obesitas di Nauru, angka penderita diabetes juga tergolong tinggi. Pada tahun 1975, prevalensi diabetes di Nauru ini mencapai 34,4% yang di mana angka ini menempatkan Nauru pada peringkat kedua di dunia untuk tingkat diabetes tertinggi yang pernah tercatat<sup>107</sup>. Pada tahun 2020 sendiri, prevalensi diabetes pada laki-laki berjumlah 13,2%, sedangkan pada perempuan menyentuh angka 13,8%. Selama masa periode lima tahun, angka diabetes pada

<sup>106</sup> Amy K McLennan, Stanley J Uljaszek, *Obesity Emergence in the Pacific Island: Why Understanding Colonial History and Social Change is Important*, Public Health Nutrition, Vol. 18, No. 8 (2014), hal. 1502-1503.

<sup>107</sup> Michael Curtis, *The Obesity Epidemic in the Pacific Island*, Journal of Development and Social Transformation, vol.1, New York: Cornell University Institute for Public Affairs.

laki-laki maupun perempuan meningkat. Pada tahun 2024, prevalensi diabetes laki-laki Nauru naik menjadi 14,9%. Sama dengan peningkatan diabetes laki-laki, diabetes perempuan Nauru pada tahun 2024 juga meningkat mencapai angka 15,6%. Tingginya angka diabetes perempuan di Nauru ini terjadi karena mereka menjalani beban ganda. Beban ganda yang dimaksud adalah pada aspek kesehatan, baik pada sisi ketidakseimbangan nutrisi maupun dampak dari sosial dan ekonomi dari perubahan pola hidup pasca degradasi lingkungan.

Pada awalnya hanya sedikit peneliti yang membahas mengenai tingkat diabetes di negara Nauru dalam skala populasi, oleh karena itu para peneliti hanya berasumsi untuk hanya menjelaskan data mereka dan mengusulkan cara yang baik untuk para pengidap diabetes ini untuk kedepannya. Awalnya mereka mengatakan bahwa penyebab diabetes yang terjadi di Nauru ini adalah kecenderungan genetik populasi dari pulau Nauru terhadap diabetes. Tercatat bahwa diabetes tipe 2 ini adalah penyebab utama kematian dan juga kecacatan yang diiringi oleh penyakit jantung dan juga stroke<sup>108</sup>. Di Nauru juga terjadi kecacatan yang berhubungan dengan diabetes, mulai dari anggota tubuh yang membusuk ataupun diaputasi dan pada akhirnya menyebabkan kebutaan hingga penyakit ginjal. Tidak sedikit juga masyarakat Nauru yang mengalami efek samping yang melemahkan otot-otot mereka karena konsumsi obat-obatan diabetes. Harapan hidup di negara ini

---

<sup>108</sup> Amina Khambalia, Philayrath Phongsavan, et.al, *Prevelence and Risk Factors of Diabetes and Impaired Fasting Glucose in Nauru*, BMC Public Health, Vol. 11, No. 719 (2011), hal. 3

tergolong rendah, yaitu sekitar 60 tahun untuk pria dan 66 tahun untuk perempuan<sup>109</sup>.

Pada awal tahun 2010 salah satu peneliti yaitu McLennan mempelajari penyakit tidak menular lain di Nauru yaitu obesitas. Berdasarkan penelitiannya yang sebelumnya, McLennan bermaksud untuk mencari tahu mengenai kasus perubahan pola makan dan juga aktivitas fisik dari masyarakat sepanjang abad ke-20. McLennan akhirnya memfokuskan penelitiannya pada suara masyarakat lokal Nauru. Dengan cara mendokumentasikan sejarah status sosial ekonomi mereka yang rendah, tekanan sosial, dan juga keluarga yang berantakan yang disebabkan oleh adanya kolonialisme, kekayaan, kemiskinan dan juga rusaknya tanah mereka. Semua aspek kehidupan masyarakat Nauru ini bertepatan dengan banyaknya pengidap penyakit diabetes tipe 2 di negara ini<sup>110</sup>.

Masalah diabetes ini pun diperparah dengan adanya keterbatasan akses pada layanan kesehatan dan juga pengelolaan penyakit kronis di Nauru. Banyak dari penderita diabetes tipe 2 ini tidak mendapatkan pemeriksaan yang rutin ataupun penanganan dini yang memadai<sup>111</sup>. Hal ini menyebabkan banyak kasus-kasus baru yang terdiagnosis saat sudah memasuki tahap lanjut, yaitu pada saat komplikasi sudah mulai terjadi dan juga penderita diabetes ini naik ke tingkat yang sulit untuk ditangani. Tingginya angka diabetes ini pun mulai ikut berdampak pada aspek produktivitas nasional. Banyak dari individu yang berada pada usia kerja yang

---

<sup>109</sup> M Schooneveldt, T Songer, P Zimmet, et. all, *Changing Mortality Patterns in Nauruans: An Example of Epidemiological Transition*, Journal of Epidemiology and Community Health, No, 42, hal. 93-94.

<sup>110</sup> *Ibid.* hal. 92

<sup>111</sup> M Schooneveldt, T Songer, P Zimmet, *Changing mortality patterns in Nauruans: an example of epidemiological transition*, Epidemiology&Community Health, vol.42, no.1.

terpaksa berhenti bekerja atau mengurangi aktivitas mereka karena kondisi kesehatan mereka yang menurun<sup>112</sup>. Hal ini juga mengembalikan Nauru pada asiklus ketergantungan terhadap bantuan sosial dari pemerintah dan juga memperlambat pemulihan ekonomi pasca krisis sumber daya alam yang terjadi di negara Nauru ini.

## **2.7 Kondisi Nauru Dalam jangka Waktu 2020-2024: Ketergantungan, Krisis, dan Tantangan Keberlanjutan**

Pada jangka waktu lima tahun kebelakang yaitu 2020 hingga 2024 masih terdapat fosfat pada lapis kedua, namun jumlahnya yang terhitung sangat terbatas, biaya eksplorasi yang tinggi, dan kualitas yang rendah ini dapat berisiko lebih tinggi lagi secara ekologis. Karena itu, cadangan ini belum menjadi solusi untuk jangka pendek yang realistis. Kondisi ekologis pun tetap tidak ada perubahan. 80% wilayah daratannya masih tidak dapat di regenasi untuk penggunaan pemukiman ataupun pertanian akibat dari eksploitasi fosfat. Upaya untuk restorasi lingkungan juga berjalan lamban, bahkan tidak signifikan secara struktural. Sedikitnya kebijakan pemulihan ekologis ini adalah bukti bahwa kurangnya kapasitas negara Nauru dari segi fiskal, teknologi, atau kelembagaan.

Dampak kesehatan mulai hadir dengan prevalensi obesitas dan diabetes yang meningkat pesat, didorong juga dengan pola makan masyarakat Nauru yang tidak sehat. Nauru juga masih bergantung pada bantuan internasional dan juga mengalami krisis berkelanjutan di berbagai aspek. Sektor pendidikan dan tenaga

---

<sup>112</sup> Karen Carter, Taniela Sunia Soakai, Richard Taylor, et.al, *Mortality Trends and the Epidemiological Transition in Nauru*, Asia-Pacific Journal of Public Health, vol.23, no.10

kerja pun mengalami tekanan. Banyak tenaga kerja yang berusia produktif memilih untuk bermigrasi sebagai pekerja musiman di Australia dan Selandia Baru untuk mencari pendapatan yang lebih baik. Sektor ekonomi Nauru yang masih didominasi dengan kerja sama kontroversial dengan negara Australia melalui pengumpulan pencari suaka juga masih menjadi tulang punggung negara ini. Namun tetap saja kondisi lingkungan menjadi tantangan utama oleh Nauru. Ketidakmampuannya untuk merehabilitasi bekas pertambangan menyebabkan degradasi ekologis terus berjalan. Air bersih dan juga tanah subur menjadi sangat terbatas dan akhirnya menghambat ketahanan pangan lokal.

Tantangan yang berkelanjutan ini tidak hanya bersifat ekologis, namun juga sosial dan politik. Krisis identitas, ketergantungan bantuan, dan juga lemahnya kepemimpinan menjadikan Nauru menjadi negara yang rentan akan dinamika global yang tidak menentu. Bab ini menjelaskan transformasi Nauru dari masyarakat yang subsisten dengan pola hidup yang harmonis dan bertempat tinggal pada lingkungan yang subur berubah menjadi negara yang mengalami kerusakan ekologis, krisis identitas budaya, dan juga ketergantungan ekonomi yang menerus karena eksploitasi fosfat. Bab ini menjadi pondasi penting untuk memahami bagaimana kompleksitas kerusakan lingkungan yang tidak hanya menghancurkan alam namun juga mendorong perubahan pola hidup, identitas dan sosial masyarakat Nauru.